



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH



RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021

SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Veteran No. 70 Eks. Lap. Poliko
Telp (0752) 92601, 92957 Fax (0752) 93279
Payakumbuh



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 35 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah dievaluasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan peraturan Walikota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran

- Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 41);
 19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);
 20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3)
 21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1);
 22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
 23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);

24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 1);
25. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 80) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 22);
26. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.

3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD Kota Payakumbuh adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Struktur Tata Ruang Kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kota.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
18. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
19. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang

dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berisi satu atau lebih sub-kegiatan untuk menghasilkan keluaran (*output*) atau semi output dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
23. Sub-kegiatan adalah serangkaian aktivitas pekerjaan atau layanan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menghasilkan keluaran (*output*).
24. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
25. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
26. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
27. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
28. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 merupakan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2021;

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 ditetapkan oleh Walikota Payakumbuh.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sesuai dengan urusan dan kewenangan Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyusun Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 7. Dinas Sosial;
 8. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 10. Dinas Ketahanan Pangan;
 11. Dinas Lingkungan Hidup
 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 13. Dinas Perhubungan;
 14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu;

17. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Pertanian;
20. Sekretariat Daerah;
21. Sekretariat DPRD;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Badan Keuangan Daerah
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Inspektorat;
26. Kecamatan Payakumbuh Utara;
27. Kecamatan Payakumbuh Barat;
28. Kecamatan Payakumbuh Timur;
29. Kecamatan Payakumbuh Selatan;
30. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan
31. Kantor Kesbangpol.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah harus memuat program, kegiatan, sub-kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan bersifat indikatif

Pasal 5

Sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran perangkat daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
- e. penutup.

Pasal 6

Dokumen Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat

(1), adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022;
- b. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022
- c. RTRW Kota Payakumbuh;
- d. Hasil pelaksanaan musrenbang forum Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 8

Penetapan Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan teknis Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun ke depan;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Apabila dalam pelaksanaan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2021 mengalami perubahan, maka Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 5 Agustus 2020



Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 5 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan

Pada tahun 2021 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya. Rencana Kerja (RENJA) tahun 2021 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Strategis, Dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahun anggaran 2021 serta mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Payakumbuh, Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH



Drs. H. RIDA ANANDA, M.Si
NIP. 19680607 198809 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	7
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH	7
TAHUN 2019	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah.	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah	27
2.4 Review terhadap RKPD Tahun 2021	34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	50
BAB III	52
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	52
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	52
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	52
3.3. Program, Kegiatan dan Subkegiatan	53
BAB IV	70
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	70
BAB V	95
PENUTUP	95

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	: Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019.....	8
Tabel 2.2	: Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019.....	19
Tabel 2.3	: Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
Tabel 2.4	: Review Terhadap RKPD Tahun 2021.....	35
Tabel 2.5	: Persandingan Daftar Kegiatan Prioritas Hasil MUSRENBANG Kecamatan Tahun 2021 Dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2021.....	50
Tabel 3.1	: Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2021 Sumber Dana APBD Kota Payakumbuh.....	55
Tabel 4.1.a	: Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2021 (Sesuai Renstra)	70
Tabel 4.1.b	: Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2021 (Sesuai Renstra)	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/ Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu sejalan dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Sekretariat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- a. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. Rencana Kerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021.
- c. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja Satuan Perangkat Daerah pada tahun 2021.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan Penyusunan Rencana Kerja. Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD.
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

Sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Bahwa untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, maka perlu adanya klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang selanjutnya digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur) ditujukan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Informasi dimaksud digunakan untuk:

1. membantu kepala daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan anggaran daerah serta laporan pengelolaan keuangan daerah;
2. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah;
3. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah;
4. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;

5. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
6. mendukung penyelenggaraan sistem informasi pemerintahan daerah; dan
7. melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 458);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh tahun 2012 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 6);
22. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 80);
23. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Nomor 23).

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh adalah :

1. Memberikan fokus kerja organisasi dan pelayanan yang lebih diarahkan pada upaya memperkuat kelembagaan pembangunan daerah melalui unit kerjanya serta mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dan mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah
2. Sebagai pedoman bagi Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama periode 1 (satu) tahun anggaran

b. Tujuan

Tujuan penyusunan rencana kerja Sekretariat Daerah adalah :

1. Mewujudkan visi, misi, tujuan , sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Sekretariat Daerah
3. Meningkatkan pelayanan Masyarakat

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah

BAB V. Penutup



BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah.

Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh berguna untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana kerja Sekretariat Daerah apakah sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dan menjadi pertimbangan untuk pelaksanaannya pada tahun berikutnya serta kemungkinan adanya kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan dilapangan.

Evaluasi rencana kerja difokuskan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
LAPORAN EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Perangkat daerah : SEKRETARIAT DAERAH

Sasaran	NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA SAMPAI TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RENSTRA)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA S/D RENJA TAHUN 2018		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2019		REALISASI KINERJA PADA ANGGARAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (2019)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2019	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2019 (%)	SKPD PENANGGUNGJAWAB							
				5		6		7		8		9		10		11						12(8+9+10+11+12)		13=6+12		14=13/5X100		15
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)					K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM Setdako		30,361,349,797	-	5,391,909,285	80,35	7,908,866,743	82,91	1,110,974,893	-	2,055,571,127		1,914,379,874		2,512,546,707	82,91	7,593,472,601	-	12,985,381,886		42.77%	SETDAKO				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang tersedia dan jumlah surat yang terkirim	20.400 surat	114.130.000		15.998.000	2375 lbr	15.850.000	500 lbr	3.150.000		500 lbr	6.450.000	500 lbr	2375	4.710.000	500 lbr	1.539.000	2.370 lbr	15.849.000		31.847.000	27.90%				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, air, televisi berlangganan dan listrik yang disediakan	20 rek	3.664.500.000		498.459.750	4 rek	858.000.000	4 rek	161.359.423	4 rek	171.533.195	4 rek	169.898.333	4 rek	171.514.008	4 rek	674.304.959		1.172.764.709			32.00%				
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase lancarnya aktivitas perkantoran	100%	2.777.300.000		385.758.000	100%	496.110.000	5%	19.491.600	45%	195.080.000	25%	110.957.000	25%	155.850.500	100%	481.379.100		867.137.100			31.22%				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang pajaknya dibayarkan	367 unit	236.200.000		37.452.250	61 unit	50.500.000	8 unit	8.245.000	12 unit	4.678.850	20 unit	5.809.750	21 unit	27.697.500	61 unit	46.431.100		83.883.350			35.51%				
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyedia administrasi keuangan	60 org	1.709.940.500		305.709.260	80 org	587.754.763	80 org	94.895.935	80 org	141.297.200	80 org	140.366.190	80 org	196.520.870	80 org	573.080.195		878.789.455			51.39%				
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan yang tersedia	72 bln	1.579.400.000		253.336.032	12 laporan	517.466.703	3 laporan	77.956.833	3 laporan	145.073.247	3 laporan	126.187.116	3 laporan	168.249.507	12 laporan	517.466.703		770.802.735			48.80%				
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	270 unit	122.200.000		20.996.075	1 paket	23.500.000	1 paket	3.630.000	1 paket	8.570.000	1 paket	9.200.000	1 paket	2.100.000	1 paket	23.500.000		44.496.075			36.41%				
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	78 item	382.280.250		39.838.610	1 paket	44.522.025	1 paket	11.967.780	1 paket	19.400.590	1 paket	8.501.900	1 paket	4.641.980	1 paket	44.512.250		84.350.860			22.07%				
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	13 item	512.574.000		61.986.740	1 paket	74.201.500	1 paket	19.251.958	1 paket	23.473.524	1 paket	18.323.096	1 paket	13.150.814	1 paket	74.199.392		136.186.132			26.57%				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	6234 unit	383.250.000		72.281.000	1452 unit	80.000.000	350 unit	17.666.000	150 unit	8.943.000	535 unit	7.056.500	415 unit	46.326.500	1450 unit	79.992.000		152.273.000			39.73%					
	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	12 jenis buku	35.000.000		4.631.700	1 paket	5.000.000	-	-	-	-	-	-	1 paket	4.666.425	1 paket	4.666.425		9.298.125			26.57%					
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum yang disediakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas	2500 porsi	7.248.200.000		1.356.359.950	40.000 porsi	1.467.100.000	3000 porsi	188.507.300	19.000 porsi	443.396.800	12.000 porsi	365.119.750	9.450 porsi	456.182.990	39.450 porsi	1.453.206.840		2.809.586.790			38.76%					
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	550 kali	5.009.565.000		964.195.766	648 kali	2.041.080.000	100 kali	312.512.601	232 kali	463.069.500	104 kali	600.567.751	215 kali	663.235.222	651 kali	2.039.385.074		3.003.580.840			59.96%					
	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga harian lepas yang dipekerjakan	5 tahun	5.977.590.047		1.290.265.152	12 laporan	1.637.781.752	3 laporan	192.340.463	3 laporan	424.605.221	3 laporan	347.682.488	3 laporan	600.871.391	12 laporan	1.565.499.563		2.855.764.715			47.77%					
	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non-PNS	Jumlah Non PNS yang dijamin pemeliharaan kesehatannya	20 org	100.000.000		-	4 org	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0			0.00%					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 unit	509.220.000		84.641.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		84.641.000			16.62%					
	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			19,388,398,746	-	5,878,428,494	80%	5,940,127,900		250,650,510		446,031,722		863,023,558		3,935,739,478	80%	5,495,445,268		11,373,873,762			58.66%				

Sasaran	NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA SAMPAI TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RENSTRA)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA S/D RENJA TAHUN 2018		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2019		REALISASI KINERJA PADA ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (2019)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2019		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2019 (%)		SKPD PENANGGUNGJAWAB				
				5		6		7		8		9		10		11		12(8+9+10+11+12)			13=6+12		14=13/5X100	
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)	K	(Rp)
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jasa penyewaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 tahun	810.400.000	465.050.000	5 paket	1.373.300.000	-	1 paket	59.950.000	1 paket	74.624.000	3 paket	1.053.088.300	5 paket	1.187.662.300	1.652.712.300	203.94%					
		Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang disediakan	5 tahun	3.881.428.746	308.332.000	5 paket	289.225.500	2.420.000	1 paket	9.900.000	1 paket	99.649.000	3 paket	171.231.500	5 paket	283.200.500	591.532.500	15.24%					
		Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang disediakan	5 tahun	231.500.000	207.619.000	221 unit	270.640.000	-	-	-	-	-	221 unit	253.575.000	221 unit	253.575.000	461.194.000	199.22%					
		Pengadaan Kelengkapan Sarana dan Peralatan Rumah Jabatan	Jumlah sarana dan prasarana rumah jabatan yang diadakan	5 tahun	634.950.000	224.926.620	5 paket	211.345.750	1.452.000	1 paket	41.723.000	1 paket	39.562.000	3 paket	127.931.000	5 paket	210.668.000	435.594.620	68.60%					
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin rumah jabatan	15 unit	1.256.620.000	397.811.850	3 paket	524.200.000	16.649.000	3 paket	27.557.500	3 paket	191.792.460	3 paket	272.862.640	3 paket	508.861.600	906.673.450	72.15%					
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor	5 unit	616.000.000	73.150.050	3 paket	480.000.000	13.699.400	1 paket	25.294.900	1 paket	114.036.000	1 paket	303.646.900	3 paket	456.677.200	529.827.250	86.01%					
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin mobil jabatan	24 unit	1.700.200.000	288.169.224	5 unit	317.500.000	46.129.960	5 unit	68.184.222	5 unit	117.211.906	5 unit	84.380.769	5 unit	315.906.857	604.076.081	35.53%					
		Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		52.500.000	505.720.000	61 unit	707.550.000	143.939.900	61 unit	183.983.850	61 unit	185.302.692	61 unit	193.795.719	61 unit	707.022.161	1.212.742.161	2309.99%					
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah pemeliharaan rutin perlengkapan rumah jabatan	5 tahun	230.500.000	40.762.600	3 unit	37.500.000	4.770.000	3 unit	6.830.000	3 unit	2.404.000	3 unit	19.645.000	3 unit	33.649.000	74.411.600	32.28%					
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	5 tahun	247.500.000	45.735.400	1 gedung	72.500.000	1.996.500	1 gedung	3.113.000	1 gedung	12.870.000	1 gedung	43.983.500	1 gedung	61.963.000	107.698.400	43.51%					
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah pemeliharaan rutin peralatan rumah jabatan	5 tahun	496.900.000	79.638.000	3 unit	80.000.000	10.992.750	3 unit	9.421.500	3 unit	15.966.500	3 unit	33.607.150	3 unit	69.987.900	149.625.900	30.11%					
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	5 tahun	434.250.000	48.866.750	1 unit	56.400.000	8.601.000	1 unit	10.073.750	1 unit	9.605.000	1 unit	26.992.000	1 unit	55.271.750	104.138.500	23.98%					
		Pengadaan Kendaraan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	5 tahun	8.445.930.000	2.151.440.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.151.440.000	25.47%					
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	5 tahun	349.720.000	328.852.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328.852.000	94.03%					
		Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah bangunan gedung yang direhab	1 gedung	-	393.989.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393.989.000	0.00%						
		Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah bangunan gedung yang tersedia	1 gedung	-	318.366.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318.366.000	0.00%						
		Pengadaan Kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		-	-	3 unit	1.519.966.650	-	-	-	-	3 unit	1.351.000.000	3 unit	1.351.000.000	1.351.000.000	0.00%						
	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			975.000.000	167.571.250	100%	202.983.600	-	-	100%	152.983.600	-	-	49.808.000	100%	202.791.600	370.362.850	37.99%					
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	900 stel	975.000.000	167.571.250	157 stel	202.983.600	-	157 stel	152.983.600	-	-	-	49.808.000	157 stel	202.791.600	370.362.850	37.99%					
	4	Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	Jumlah ASN yang mengikuti Blmtek		639.917.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	dokumen IKU yang Smart		639.917.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%					
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi AKIP dan KKM Kota Payakumbuh		4.983.674.576	681.617.015	BB 80,35	592.192.467	BB 81,66	26.861.857	119.673.110	-	111.496.887	-	294.690.306	BB 81,66	552.722.160	1.234.339.175	24.77%					

Sasaran	NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA SAMPAI TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RENSTRA)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA S/D RENJA TAHUN 2018		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2019		REALISASI KINERJA PADA ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KINERJA YANG DIEVALUASI (2019)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2019		TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2019 (%)		SKPD PENANGGUNGJAWAB				
				5		6		7		8		9		10		11		12(8+9+10+11+12)			13=6+12		14=13/5X100	
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)	K	(Rp)
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah (SKPD)	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja yang disusun	5 dokumen	268,121,782	46,984,052	4 dokumen	7,088,010	1 dokumen	2,658,100	1 dokumen	2,446,380	1 dokumen	818,400	1 dokumen	1,071,760	4 dokumen	6,994,640	53,978,692	20.13%				
		Penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah Laporan SPM yang disusun	5 dokumen	275,439,891	23,617,200	1 dokumen	2,227,790	1 dokumen	2,227,790	-	-	-	-	1 dokumen	2,227,790	-	25,844,990	9.38%					
		Penyusunan laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah Laporan SPM yang disusun	5 dokumen	758,088,751	113,301,535	1 dokumen	155,629,965	-	2,648,600	-	2 dokumen	2,379,600	-	150,000,000	2 dokumen	155,028,200	268,329,735	35.40%					
		Penyusunan perjanjian Kinerja dan pelaporan kinerja SKPD	Jumlah perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja yang terurus	2 dokumen	334,192,900	66,743,040	2 dokumen	14,255,970	1 dokumen	4,012,650	1,455,332	1 dokumen	2,526,000	-	5,926,820	2 dokumen	13,920,802	80,663,842	24.14%					
		Monitoring Evaluasi dan Pelaporan bantuan hibah	Persentase penyaluran dana hibah	1	106,729,051	9,215,350	100%	10,387,500	-	-	-	-	3,009,000	100%	6,772,000	100%	9,781,000	18,996,350	17.80%					
		Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti kompetisi pelayanan publik	15 OPD	371,536,887	47,607,196	1 dokumen	51,861,540	-	-	913,920	1 dokumen	3,098,750	-	46,200,766	1 dokumen	50,213,436	97,820,632	26.33%					
		Peningkatan Kapasitas Ketatalaksanaan	Jumlah sosialisasi pelayanan publik yang dilaksanakan dan jumlah rakornis akortek pelayanan publik yang diikuti	10 kali	867,373,564	90,921,942	6 kali	59,530,559	1 kali	11,873,367	1 kali	660,000	2 kali	19,185,175	2 kali	18,864,255	6 kali	50,582,797	141,504,739	16.31%				
		Penilaian unit pelayanan publik	Jumlah perangkat daerah yang pelayanan publiknya salam kategori hijau/baik	31 OPD	308,918,060	45,993,791	1 dokumen	10,391,534	-	-	-	-	999,540	1 dokumen	6,812,830	1 dokumen	7,812,370	53,806,161	17.42%					
		Penyusunan perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh	Jumlah dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perjanjian kinerja OPD sekota Payakumbuh dan dokumen laporan kinerja instansi LKJIP	10 Dokumen	502,627,660	153,587,057	2 dokumen	148,114,825	2 dokumen	3,441,350	108,616,390	-	9,063,912	-	19,365,915	2 dokumen	140,487,567	294,074,624	58.51%					
		Peningkatan kapasitas akuntabilitas kinerja dan kelembagaan				57,318,180	2 kali	64,509,795	-	1 kali	3,729,600	-	40,939,850	1 kali	11,419,610	2 kali	56,089,060	113,407,240	0.00%					
		Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan	Jumlah dokumen terkait dengan rekomendasi PP	31 OPD	119,018,831	-	6 PD	48,357,129	-	-	1,851,488	-	25,346,596	29 PD	20,543,100	29 PD	47,741,184	47,741,184	40.11%					
		Forum Konsultasi Publik	Jumlah forum konsultasi publik yang dilakukan	5 dokumen	66,306,000	26,327,672	1 dokumen	18,837,850	-	-	-	1 dokumen	4,130,064	-	7,713,250	1 dokumen	11,843,314	38,170,986	57.57%					
		Bimtek Implementasi AKIP	Jumlah orang yang melaksanakan implementasi AKIP	5 kali	518,167,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%					
		Penyusunan Laporan Keuangan	Pengelolaan Keuangan sesuai ketentuan	3 Dokumen	250,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%					
		Facilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Camat dan Lurah	Jumlah rapat koordinasi yang dihasilkan	2 dokumen	98,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%					
		Evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Payakumbuh (5 Area Perubahan)	Jumlah dokumen RB yang dievaluasi	2 dokumen	4,821,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%					
		Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik	Jumlah dokumen perencanaan dan pelayanan publik yang disusun		133,832,049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%					

Sasaran	NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA SAMPAI TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RENSTRA)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA S/D RENJATAHUN 2018		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJATAHUN 2019		REALISASI KINERJA PADA ANGGARAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (2019)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2019		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2019 (%)	SKPD PENANGGUNGJAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12(8+9+10+11+12)		13=6+12		14=13/5X100	15
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)
	6	Program Peningkatan pelayanan kedinasan KDH/ Wakil KDH	Meningkatnya pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	16,121,317,980	-	3,279,683,052	100%	3,786,451,500	-	570,258,163		685,506,843	-	1,115,663,300	99,99%	1,217,179,804	99,99%	3,588,608,110	-	-			
		Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Rapat koordinasi pejabat	60 Laporan	628,035,500	52,687,980	12 kali	61,144,000	3 kali	14,683,440	3 kali	3,805,000	3 kali	19,180,000	3 kali	18,042,640	12 kali	55,711,080		108,399,060		17.26%	
		Kunjungan kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil KDH	Jumlah kunjungan kerja Kepala Daerah/Wakil KDH	1	4,069,037,000	1,505,010,647	96 kali	1,798,806,000	24 kali	279,400,030	24 kali	262,109,714	24 kali	538,425,834	24 kali	585,385,253	96 kali	1,665,320,831		3,170,331,478		77.91%	
		Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat	1	3,740,214,000	918,889,184	96 kali	1,149,350,000	16 kali	184,261,243	32 kali	235,662,679	24 kali	401,454,566	24 kali	320,069,661	96 kali	1,141,448,149		2,060,337,333		55.09%	
		Penyebarluasan informasi kegiatan KDH/ Wakil KDH	Persentase penyebarluasan informasi kepala daerah dan wakil kepala daerah	7530 Relis, 12000 Foto, 60 Video, 427080 Surat Kabar, 348 Lapsus Media Online, 350 Liputan Ramadhan	5,905,960,180	694,610,500	30%	700,427,500	9%	88,226,450	31%	177,173,450	22%	135,108,900	26%	255,167,250	88%	655,676,050		1,350,286,550		22.86%	
		Peningkatan pelayanan keprotokoleraan	Persentase pelayanan keprotokoleraan	100	624,894,400	108,484,741	100%	76,724,000	12%	3,687,000	53%	6,756,000	10%	21,494,000	23%	38,515,000	98%	70,452,000		178,936,741		28.63%	
		Pelaksanaan Koordinasi Pemerintahan Umum	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	1 tahun	583,175,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Dialog/Audensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat	jumlah peserta audensi yang mengikuti dialog	890 orang peserta	170,001,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%		
		Inspeksi KDH dan Wakil KDH	Jumlah inspeksi yang dilakukan kepala daerah, kecamatan dan kelurahan	5 kecamatan dan 47 kelurahan	400,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%			
Meningkatnya pelayanan hukum sesuai dengan kewenangan Daerah	7	Program Penataan peraturan perundang-undangan	Persentase penyelesaian masalah hukum yang diproses secara non litigasi	4,516,600,489	-	505,034,804	70%	380,255,000	-	2,772,000		45,640,030		95,943,840	60%	161,215,208	60%	305,571,078	-	810,605,882		17.95%	
		Koordinasi kerjasama permasalahan perundang-undangan	Jumlah tertanganinya permasalahan hukum	Terselesainya masalah hukum di Pemko Pyk (5 kasus litigasi, 9	2,078,064,489	297,906,468	1 kasus	249,854,525	-	1 kasus	23,301,540	70,468,820	108,182,720	1 kasus	201,953,080	499,859,548	24.05%						
		Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ranperda yang dibahas di DPRD	Dibahasnya Ranperda di DPRD Kota Pyk (50 Ranperda)	710,050,000	91,509,987	6 ranperda	47,742,000	2,772,000	2 ranperda	14,838,490	1 ranperda	11,311,900	6 ranperda	13,957,448	9 ranperda	42,879,838	134,389,825	18.93%				
		Facilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah sosialisasi yang akan dilaksanakan	23 kali	485,638,000	19,864,900	2 kali	43,144,850	-	-	5,136,800	3 kali	21,048,680	3 kali	26,185,480	46,050,380	9.48%						

Sasaran	NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH / DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA SAMPAI TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RENSTRA)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA S/D RENJA TAHUN 2018		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2019		REALISASI KINERJA PADA ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (2019)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2019		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2019 (%)		SKPD PENANGGUNGJAWAB				
				5		6		7		8		9		10		11		12(8+9+10+11+12)			13=6+12		14=13/5X100	
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)	K	(Rp)
		Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah lembaran daerah yang dipublikasikan	500 Lembaran Daerah, 500 Berita Daerah, dan 500 Panduan Hukum, 1 Web	410.189.000	62.311.849	150 buku	28.288.625	-	-	8.869.000	150 buku	17.180.000	150 buku	26.049.000	88.360.849	21.08%							
		Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Baru, Lebih Tinggi Dari Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Jumlah keputusan wako-perwako dan MOU	2800 Kip Wako, 320 Perwako, 25 MoU (14 kajian)	513.659.000	33.441.600	3 kajian	11.225.000	-	3 kajian	7.500.000	157.320	846.360	3 kajian	8.503.680	41.945.280	8.17%							
		Bantuan hukum bagi masyarakat miskin	Jumlah perkara masyarakat miskin yang dapat bantuan hukum	20 perkara	310.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%							
Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah	8	Program Penyelenggaraan pemerintahan umum dan perangkat daerah	Peringkat LPPD		10.062.809.400	-	756.693.530	16	1.136.317.200	149.242.025	30	88.771.592	-	301.214.111	-	407.265.011	30	946.492.739	1.703.186.269	16.93%				
		Penyelenggaraan lomba kompetensi Lurah	Jumlah lurah terpilih	5 orang	548.185.000	45.198.200	1 orang	69.326.500	2.650.800	4.368.500	11.270.214	1 orang	48.107.162	1 orang	66.396.676	111.594.876	20.36%							
		Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Kelurahan	Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan kelurahan	10 kegiatan	406.168.000	28.756.640	1 kegiatan	26.379.000	-	-	-	1 kegiatan	23.890.290	1 kegiatan	23.890.290	52.646.930	12.96%							
		Penyelenggaraan lomba kompetensi camat	Jumlah camat terbaik	5 orang	448.007.000	42.065.920	1 orang	17.168.750	-	-	6.909.200	1 orang	720.000	1 orang	7.629.200	49.695.120	11.09%							
		Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan yang melaksanakan PATEN	5 kecamatan	270.956.000	27.672.100	5 unit	10.189.500	638.500	-	409.200	5 unit	6.966.400	5 unit	8.014.100	35.686.200	13.17%							
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Jumlah LKPJ Kota Payakumbuh Tahun n-1	5 dokumen & tepat waktu	574.552.000	106.521.700	1 dokumen	136.390.000	133.050.575	-	2.560.000	-	1 dokumen	135.610.575	242.132.275	42.14%								
		Koordinasi Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD)	Jumlah ILPPD Kota Payakumbuh Tahun n-1	5 dokumen & tepat waktu	279.672.000	31.236.000	1 dokumen	29.818.000	-	1 dokumen	3.588.700	25.246.320	763.840	1 dokumen	29.598.860	60.834.860	21.75%							
		Data rupa bumi Kota Payakumbuh	Jumlah dokumen updating data rupa bumi yang disusun	5 paket	503.200.000	18.364.500	1 dokumen	33.945.000	-	1.532.625	795.000	1 dokumen	30.834.100	1 dokumen	33.161.725	51.526.225	10.24%							
		Koordinasi Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan lembaga/organisasi masyarakat yang dibina	5 Kecamatan pertahun	1.797.256.400	314.438.750	8 kegiatan	410.925.000	8.692.900	1 kegiatan	51.141.850	3 kegiatan	97.394.567	3 kegiatan	235.643.145	392.872.462	707.311.212	39.36%						
		Fasilitasitas Batas daerah	Jumlah pilar yang dibangun	1 Peraturan Daerah	1.272.443.000	63.038.520	40 petak	147.281.950	720.000	-	504.000	933.500	-	2.157.500	65.196.020	5.12%								
		Koordinasi Penyusunan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dan koordinasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan (LPPD)	Jumlah dokumen EKPPD dan LPPD yang dikordinasikan tahun n-1	2 dokumen	564.868.000	79.401.200	2 dokumen	143.028.500	3.489.250	19.357.860	117.141.660	2.844.050	2 dokumen	142.832.820	222.234.020	39.34%								
		Rapat Koordinasi pemerintahan umum	Jumlah numusan rakor yang diikuti	1 Tahun	-	-	12 kali	61.920.000	-	6 kali	8.782.057	3 kali	38.983.950	3 kali	9.530.000	57.296.007	57.296.007	#DIV/0!						

Sasaran	NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA SAMPAI TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RENSTRA)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SID RENJA TAHUN 2018		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2019		REALISASI KINERJA PADA ANGGARAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (2019)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SID TAHUN 2019		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SID TAHUN 2019 (%)		SKPD PENANGGUNGJAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12(8+9+10+11+12)		13=6+12		14=13/5X100		
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	
		Penyelenggaraan administrasi RT/RW	Persentase administrasi RT/RW se-Kota Payakumbuh	48 Kelurahan n. 551 RT/RW dan 48 LPM pertahun	666,676,000	-	1 paket	49,945,000	-	-	-	-	-	1 paket	47,032,524	1 paket	47,032,524	47,032,524			7.05%			
		Penyusunan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh	Nilai AKP	2 dokumen	271,089,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			0.00%			
		Fasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan Rapat Kerja Camat dan Lurah	Jumlah rapat kerja yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah	2 dokumen	320,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			0.00%			
		Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersedianya LPPD Kota Payakumbuh Tahun n-1	5 dokumen & tepat waktu	88,315,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			0.00%			
		Koordinasi Penyusunan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Camat dan Lurah di Kota Payakumbuh	5 dokumen & tepat waktu	137,998,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			0.00%			
		Koordinasi Penyusunan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen EKPOD Kota Payakumbuh tahun n-1	5 dokumen & tepat waktu	119,402,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			0.00%			
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ)	Terlaksananya pelatihan tentang pengisian administrasi pemerintah kelurahan dan tersedianya buku administrasi pemerintahan kelurahan	2 dokumen & Tepat waktu	298,814,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			0.00%			
		Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan (LPPD AMJ)	Jumlah fasilitasi batas kecamatan dan kelurahan	1 dokumen & Tepat waktu	218,020,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			0.00%			
		Penyediaan buku administrasi pemerintahan kecamatan	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	25 paket	320,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			0.00%			
		Penyediaan buku administrasi pemerintahan kelurahan	Jumlah buku administrasi yang disediakan	235 paket	400,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			0.00%			
		Penyusunan Indikator Kinerja Utama	Jumlah dokumen IKU yang disusun	1 dokumen	30,932,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.00%			
		Penegasan Batas Kecamatan	Jumlah patok batas kecamatan yang disediakan	100 patok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.00%			
		Penegasan Batas Kelurahan	Jumlah patok batas kelurahan yang disediakan	200 patok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.00%			
		Penataan Nomor Rumah dan Bangunan	Jumlah Perda yang dihasilkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.00%			
		Koordinasi Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah buku profil kelurahan yang disusun	235 kegiatan	320,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.00%			
		Pelaksanaan Kegiatan BBGRM	Jumlah kelurahan untuk Pencanangan dan Kegiatan BBGRM	5 Kecamatan pertahun	206,256,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.00%			
9		Program Peningkatan kapasitas kelembagaan	Meningkatnya Kapasitas kelembagaan		1,701,866,119	-	210,776,679	80%	50,818,200	-	2,459,350	4,828,250	-	2,300,400	-	25,346,960	80%	34,934,960	-	245,711,639	14.44%			

Sasaran	NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH / DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA SAMPAI TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RENSTRA)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA S/D RENJATAHUN 2018		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJATAHUN 2019		REALISASI KINERJA PADA ANGGARAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (2019)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2019		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2019 (%)		SKPD PENANGGUNGJAWAB				
				5		6		7		8		9		10		11		12(8+9+10+11+12)			13=6+12		14=13/5X100	
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)	K	(Rp)
		Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang ekonomi	Persentase terahayanya kebijakan pengembangan dan pembangunan bidang ekonomi	12 Kali	690,927,928	113,404,866	15 kali	25,126,400	3 kali	2,109,350	1 kali	825,000	3 kali	1,105,500	5 kali	12,513,950	12 kali	16,553,800	129,958,666	18.81%				
		Pembinaan dan monitoring usaha pertambangan dan energi	Persentase terjaminnya ketersediaan dan kelancaran distribusi LPG,BBM dan listrik	4 Kali	377,237,188	42,683,925	5 kali	8,346,200	-	-	1 kali	1,386,750	3 kali	849,900	-	4,399,280	4 kali	6,635,930	40,319,855	13.07%				
		Koordinasi dan pengendalian inflasi daerah	Jumlah rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah	5 Kali	360,838,682	54,687,888	4 kali	17,345,600	350,000	1 kali	2,616,500	1 kali	345,000	3 kali	8,433,730	5 kali	11,745,230	66,433,118	18.41%					
		Facilitasi dan koordinasi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED)			272,862,321	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%				
	10	Program penataan kelembagaan dan organisasi daerah	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Peraturan Perundang-undangan		1,390,975,559	-	131,811,483	100%	88,598,270	-	5,582,175	2,963,200	-	-	-	100%	68,262,025	-	-	0.00%				
		Penataan Organisasi perangkat daerah , penyusunan tugas pokok fungsi dan uraian tugas	Jumlah raperda/perda dan perwako	10 dokumen	371,384,599	58,687,003	5 raperwako/p erwako	12,361,950	4 raperwako/p erwako	2,075,575	2 raperwako/p erwako	-	1,588,125	8,671,550	6 raperwako/p erwako	12,335,250	71,022,343	19.12%						
		Penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja dan evaluasi jabatan	Jumlah dokumen arjab,ABK perangkat daerah dan evaluasi jabatan	31 OPD	530,924,117	73,124,390	2 dokumen	76,236,320	3,506,600	2,963,200	1 dokumen	21,771,200	2 dokumen	27,685,775	3 dokumen	55,926,775	129,051,165	24.31%						
		Facilitasi forum koordinasi pembedayaan aparatur daerah		5 kali	304,370,843	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%				
		Facilitasi pembentukan, penggabungan dan penghapusan kelurahan	Persentase terkendalanya laju inflasi di Kota Payakumbuh		184,296,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%				
	11	Program Peningkatan, Pengendalian administrasi pembangunan	Persentase pengelolaan kegiatan yang tertib administrasi sesuai dengan aturan		928,974,020	-	81,319,697	100%	24,815,025	-	3,466,600	1,631,750	-	-	16,473,465	89,58%	21,571,815	-	-	0.00%				
		Monitoring, evaluasi, pengendalian administrasi pembangunan(DAU dan Non DAU)	Jumlah perangkat daerah yang mengelola dana DAU dan Non DAU	31 OPD	636,270,800	58,411,217	38%	17,528,175	1,626,400	20%	595,000	-	15%	12,672,375	35%	14,893,775	73,304,992	11.52%						
		Penyusunan laporan kegiatan pembangunan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tersusun	60 dokumen	166,898,720	22,908,480	12 dokumen	7,286,850	1,840,200	6 dokumen	1,036,750	3 dokumen	-	3 dokumen	3,801,090	12 dokumen	6,678,040	29,586,520	17.73%					
		Penyusunan petunjuk pelaksanaan, pengendalian administrasi pembangunan	Jumlah buku petunjuk pelaksanaan pengendalian adm pembangunan	2 dokumen	45,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%				
		Penyelenggaraan koordinasi infrastruktur	Persentase tertib administrasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah		80,804,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%				
	12	Program Pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi	Persentase tertib administrasi terhadap pelaksanaan barang/jasa pemerintah		5,915,087,430	-	686,006,576	100%	684,317,775	22,861,600	241,249,650	196,971,100	-	174,647,650	100%	635,730,000	-	1,321,736,576	22.35%					

Sasaran	NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH / DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA SAMPAI TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RENSTRA)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA S/D RENJATAHUN 2018		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJATAHUN 2019		REALISASI KINERJA PADA ANGGARAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJATAHUN YANG DIEVALUASI (2019)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2019		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2019 (%)		SKPD PENANGGUNGJAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12(8+9+10+11+12)		13=6+12		14=13/5X100		
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	
		Operasional penyelenggaraan LPSE	Persentase paket pengadaan barang/jasa yang metode pelaksanaannya wajib dilakukan melalui	1	2.030.658.300	253.372.581	100%	171.033.400	22.338.000	70%	33.127.900	20%	57.000.000	10%	58.561.400	100%	171.027.300	424.399.881	20.90%					
		Operasional penyelenggaraan ULP	Persentase terb administrasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah	1	3.853.050.000	432.633.995	100%	513.284.375	523.600	70%	208.121.750	25%	139.971.100	5%	116.086.250	100%	464.702.700	897.336.695	23.29%					
		Penyusunan Standar Biaya Langsung Personil Jasa Konsultansi	Jumlah standar biaya langsung yang disusun	1 dokumen	31.379.130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%						
Meningkatnya peran Lembaga agama dalam tata kehidupan masyarakat	13	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	Persentase mesjid yang dikelola secara optimal		4.722.782.997	-	474.186.204	60%	454.595.500	-	7.769.500	136.535.500	-	133.969.514	-	147.314.240	60%	425.588.754	-	795.039.958	16.83%			
		Pelayanan ibadah Haji	Jumlah jemaah haji yang difasilitasi	1	1.375.870.612	129.312.300	300 orang	185.632.000	-	300 orang	60.500.000	106.687.764	11.161.490	300 orang	178.349.254	307.661.554	22.36%							
		Operasional Tim Ramadhan	Jumlah mesjid yang dikunjungi tim ramadhan	100 mesjid	939.001.931	100.905.000	20 mesjid	31.660.000	-	20 mesjid	21.024.500	5.886.000	3.581.000	20 mesjid	30.491.500	131.396.500	13.99%							
		Operasional Wirid Pengajian	Jumlah wirid pengajian yang dilaksanakan	0.8	369.730.861	20.936.000	45 kali	26.072.000	1.998.000	20 kali	3.700.000	10 kali	4.100.000	14 kali	9.853.000	44 kali	19.651.000	40.587.000	10.98%					
		Peringatan Hari Besar Islam	Jumlah peringatan hari besar islam yang dilaksanakan	1	958.202.871	102.120.754	6 kali	78.387.000	-	3 kali	51.311.000	2 kali	8.593.750	1 kali	12.411.750	6 kali	72.316.500	174.437.254	18.20%					
		Facilitasi Kegiatan Kampung Al-Quran	Jumlah tempat ibadah yang melaksanakan magrib mengaji	0.75																				
			Jumlah tempat ibadah yang melaksanakan sholat 5 waktu																					
			Persentase jumlah kk yang melaksanakan magrib mengaji		549.228.262	79.300.150	23 tempat ibadah	64.168.000	657.000	-	4 tempat ibadah	2.425.500	19 tempat ibadah	58.575.000	23 tempat ibadah	61.657.500	140.957.650	25.66%						
			Persentase jumlah kk yang mematikan TV waktu magrib mengaji	100%																				
			Persentase jumlah wasung yang tutup waktu magrib mengaji																					
		Facilitasi Cerakan Subuh Berjamaah dan Magrib mengaji	Jumlah mesjid yang melakukan magrib mengaji	1	184.941.460		44 masjid	19.100.000	7 masjid	3.169.000	-	13 masjid	6.276.500	24 masjid	6.198.000	44 masjid	15.643.500							
			Jumlah mesjid yang melaksanakan subuh berjamaah	1																				
		Peningkatan Kompetensi imam mesjid, khatib dan pengurus mesjid	Jumlah pelatihan imam mesjid, khatib dan pengurus mesjid	65%;35 %	345.807.000	41.612.000	40 orang	49.576.500	1.945.500	-	100 orang	45.534.000	100 orang	47.479.500										
	14	Program Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Sosial Keagamaan	Persentase lembaga sosial keagamaan yang aktif		17.557.711,152	-	659.277,382	40%	1.298.205,300	-	85.915,650	418.492,100	-	341.623,500	-	425.205,450	40%	1.271.236,700	-	1.711.486,860	9.75%			
		Facilitasi kegiatan didikan subuh	Jumlah lembaga didikan subuh yang difasilitasi	0.9	347.111,684		6 LDS	74.069,700	673,750	-	6 LDS	36.988,000	34.999,900	6 LDS	72.661,650					0.00%				
			Jumlah rapat bidang keagamaan dan budaya	0.8			6 lembaga							6 lembaga										

Sasaran	NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA SAMPAI TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RENSTRA)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA S/D RENJATAHUN 2018		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJATAHUN 2019		REALISASI KINERJA PADA ANGGARAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (2019)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2019		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2019 (%)		SKPD PENANGGUNGJAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12(8+9+10+11+12)		13=6+12		14=13/5X100		
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	
			Peningkatan SDM Tenaga Pendidik dan Kependidikan TPQ/MDTA	Persentase peningkatan kompetensi guru TPQ/MDTA	100%;450 orang	9,334,234,272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		
			Pelatihan penyelenggaraan jenazah	Jumlah peserta yang melaksanakan pelatihan penyelenggaraan jenazah	61,768,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%		
	15	Program Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah	Fasilitas pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Jumlah sekolah/madrasah yang mencapai strata maksimal	1,757,919,324	-	154,538,381	100%	164,362,450	-	21,630,000	4,937,000	-	14,269,500	-	119,856,250	100%	160,692,750	-	315,231,131	17.93%			
				Jumlah rakor UKS TK Kecamatan yang dilaksanakan	75%;80%																			
				Jumlah rajor UKS tingkat TK Kota yang dilaksanakan																				
				Jumlah rakerda UKS tk kota yang dilaksanakan																				
				Jumlah sekolah yang dibina untuk lomba sekolah sehat tk propinsi	1,757,919,324		154,538,381		164,362,450		21,630,000	4,937,000		14,269,500		119,856,250		160,692,750		315,231,131	17.93%			
				Jumlah sekolah yang dibina untuk lomba sekolah sehat tk nasional																				
				Jumlah sekolah yang dinilai dalam lomba sekolah sehat tk Kota																				
				Jumlah peserta yang difasilitasi untuk mengikuti jambore UKS Tk propinsi dan nasional																				
	16	Program Peningkatan produksi daerah	Koordinasi dan fasilitasi pembentukan BUMD	Meningkatnya produksi daerah	2,415,893,051	-	131,677,468	6,2%	157,867,800	-	2,910,300	17,917,300	-	19,071,720	-	49,669,480	6,2%	89,568,800	-	221,246,268	9.16%			
				Jumlah rapat koordinasi	4 Kali	181,367,000		63,514,688	5 kali	84,420,000	1,273,500	2 kali	1,007,300		780,720		13,199,500	2 kali	16,261,020		79,775,688	43.99%		
				Jumlah promosi produk unggulan daerah	2 Kali	1,461,689,939		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%		
				Pengumpulan, updating dan analisis data informasi perkembangan produksi daerah	440 Buku	772,836,111		68,162,800	4 dokumen	73,447,800	1,636,800	16,910,000		18,291,000	4 dokumen	36,469,980	4 dokumen	73,307,780		141,470,580	18.31%			
	17	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya pengendalian manajemen KDH	149,980,000	-	24,971,860	100%	3,686,000	-	-	3,685,780	-	-	-	-	100%	3,685,780	-	28,657,640	19.11%			
				Jumlah pelaksanaan kegiatan staf ahli	5	149,980,000		24,971,860	3 kali	3,686,000	-	3 kali	3,685,780		-	-	3 kali	3,685,780		28,657,640	19.11%			

Sasaran	NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA SAMPAI TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RENSTRA)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA S/D RENJA TAHUN 2018		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2019		REALISASI KINERJA PADA ANGGARAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (2019)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2019		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2019 (%)		SKPD PENANGGUNGJAWAB																
				5		6		7		8		9		10		11		12(8+9+10+11+12)		13=6+12		14=13/5X100		15																
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)																	
	18	Program Fasilitasi dan Koordinasi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah		272,862,321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%																			
		Koordinasi dan fasilitasi forum pengembangan ekonomi daerah (FPED)	Jumlah rapat FGD	3 Kali	272,862,321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0.00%																			
Jumlah anggaran dan realisasi seluruh program				123,863,120,611	-	19,215,503,160	22,874,460,730	2,263,354,623	4,426,418,554	5,109,927,304	9,536,958,009	21,396,375,140	-	40,611,878,300	32.79%						1.82%																			
Total rata-rata capaian kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)																																								

Tabel 2.2
Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2019

No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.908.866.743	7.593.472.601	96,01%
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	5.940.127.900	5.495.445.268	92,51%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	202.983.600	202.791.600	99,91%
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	592.192.467	552.722.160	93,33%
5	Program penyelenggaraan pemerintahan umum dan perangkat daerah	1.136.317.200	946.492.739	83,29%
6	Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	3.686.000	3.685.780	99,99%
7	Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah	3.786.451.500	3.588.608.110	94,77%
8	Program Penataan dan kelembagaan Organisasi daerah	88.598.270	68.262.025	77,05%
9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	50.818.200	34.934.960	68,74%
10	Program Peningkatan Produksi Daerah	157.867.800	89.568.800	56,74%
11	Program peningkatan pengendalian administrasi pembangunan	24.815.025	21.571.815	86,93%
12	Program Pembinaan dan pengawasan jasa / konstruksi	684.317.775	635.730.000	92,90%
13	Program Penataan Peraturan	380.255.000	305.571.078	80,36%

No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
	Perundang-undangan			
14	Program peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama	454.595.500	425.588.754	93,62%
15	Program peningkatan peran dan fungsi lembaga sosial keagamaan	1.298.205.300	1.271.236.700	97,92%
16	Program peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah	164.362.450	160.692.750	97,77%
	Jumlah	22.874.460.730	21.396.375.140	93,54%

Tabel diatas sudah dapat menggambarkan bahwa Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh pada tahun 2019 melaksanakan 16 program dengan anggaran sebesar Rp. 22.874.460.730,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.396.375.140,- atau sebesar 93,54%. Namun ada beberapa program yang realisasi keuangannya dibawah 70% yaitu; Program Peningkatan kapasitas kelembagaan dimana pelaksanaan rapat koordinasi OPD dan *stakeholder* terkait lebih banyak dilakukan pada bulan puasa sehingga anggaran belanja tidak terserap secara maksimal. Kemudian Program Peningkatan Produksi Daerah yang mana dalam program tersebut terdapat pembahasan Ranperda pembentukan BUMD masih dalam proses sehingga anggaran untuk pemilihan komisaris BUMD belum dapat direalisasikan sebagaimana mestinya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

A. Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor: 84 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Sekretariat daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah. Sekretariat daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah, dan;

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah didukung dengan susunan organisasi sebagai berikut:

(1) Sekretariat Daerah

Sekretaris Daerah membawahi:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan
- c. Asisten Administrasi Umum

(2) Masing-masing Asisten membawahi:

A. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi 3 Bagian, terdiri dari:

- 1. Bagian Pemerintahan membawahi 3 Sub Bagian, terdiri dari
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum
 - b. Sub Bagian Otonomi Daerah
 - c. Sub Bagian Pembinaan Wilayah
- 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi 3 Sub Bagian, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Bina Pendidikan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
 - b. Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial
 - c. Sub Bagian Keagamaan dan Budaya
- 3. Bagian Hukum, membawahi 3 Sub Bagian, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perundang-undangan
 - b. Sub Bagian Dokumentasi Hukum
 - c. Sub Bagian Bantuan Hukum

B. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahi 3 bagian, terdiri dari:

- 1. Bagian Perekonomian membawahi 3 Sub Bagian, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Bina Produksi Daerah
 - b. Sub Bagian Bina Pengembangan Ekonomi Daerah
 - c. Sub Bagian Sarana dan Kelembagaan Ekonomi Daerah
- 2. Bagian PBJ dan Pengendalian Pembangunan membawahi 3 Sub Bagian, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
 - b. Sub Bagian LPSE
 - c. Sub Bagian Monev dan Pelaporan
- 3. Bagian Perencanaan dan Anggaran membawahi 2 Sub Bagian, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Keuangan

- C. Asisten Administrasi Umum, membawahi 3 Bagian, terdiri dari :
 - 1 Bagian Organisasi membawahi 3 SubBagian, terdiri dari
 - a. Sub Bagian Kelembagaan
 - b. Sub Bagian Tata Laksana
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Kinerja
 - 2. Bagian Umum membawahi 3 SubBagian, terdiri dari
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Perlengkapan
 - c. Sub Bagian Rumah Tangga
 - 3. Bagian Protokoler dan Dokumentasi membawahkan 3 Sub Bagian, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Protokoler
 - b. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan
- D. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 84 Tahun 2016 dijelaskan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah

Mempunyai tugas membantu Walikota dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pemerintahan daerah, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas Sekretariat Daerah

Dalam menyelenggarakan tugas, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan rencana strategis, rencana kerjadan penetapan kinerja sekretariat sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- b. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota
- c. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pengaturan, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Staf Ahli dilingkungan Pemerintah Kota dan Kecamatan
- d. Penyelenggaraan pembinaan teknis administratif kepada Inspektorat
- e. Penyelenggaraan tugas lain dari Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan pendidikan, kesehatan, Sosial, Tramtibum dan Linmas, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga,

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perpustakaan, Kearsipan, Keagamaan, Kecamatan dan Penyusunan produk hukum, pemberian bantuan hukum serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi :

- a. Dinas Pendidikan
- b. Dinas Kesehatan
- c. Dinas Sosial
- d. Sat - Pol PP dan Pemadam Kebakaran
- e. Dinas Kependudukan dan Capil
- f. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- g. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- h. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- i. Kecamatan

Fungsi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja Asisten mengacu pada rencana strategis Sekretariat Daerah.
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan pendidikan, kesehatan, sosial, tramtibus dan linmas, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perpustakaan, kearsipan, keagamaan, kecamatan, penyusunan produk hukum, pemberian bantuan hukum.
- c. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian pemantauan dan evaluasi bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tramtibus dan linmas, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perpustakaan, kearsipan, keagamaan, kecamatan, penyusunan produk hukum, pemberian bantuan hukum.
- d. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan

Mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, penanaman modal dan PTSP, Koperasi dan UMKM, Perdagangan, Perindustrian Tenaga Kerja, Energi Sumber Daya Mineral,

Lingkungan Hidup, Kehutanan, Transmigrasi, Perhubungan, PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian, BUMD/Perbankan serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi :

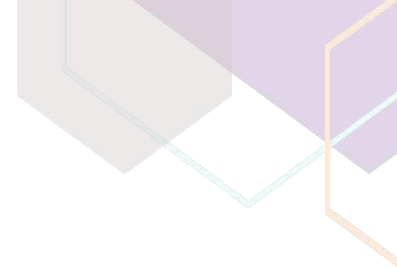
- a. Dinas Ketahanan Pangan
- b. Dinas Pertanian
- c. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- d. Dinas Koperasi dan UKM
- e. Dinas Tenaga Kerjadan Perindustrian
- f. Dinas Perhubungan
- g. Dinas PU dan Penataan Ruang
- h. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- i. Dinas Komunikasi dan Informasi
- j. Dinas Lingkungan Hidup

Fungsi Asisten Ekonomi dan Pembangunan sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja Asisten mengacu pada rencana strategi Sekretariat Daerah
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, penanaman modal dan PTSP, Koperasi dan UMKM, Perdagangan, Perindustrian Tenaga Kerja, Energi Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Transmigrasi, Perhubungan, PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian, BUMD/Perbankan
- c. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian pemantauan dan evaluasi urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, penanaman modal dan PTSP, Koperasi dan UMKM, Perdagangan, Perindustrian Tenaga Kerja, Energi Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Transmigrasi, Perhubungan, PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian, BUMD/Perbankan
- d. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

4. Asisten Administrasi Umum

Mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan organisasi dan ketatalaksanaan, pelayanan publik, pelayanan interen, pelayanan barang dan jasa serta urusan penunjang keuangan, perencanaan, kepegawaian dan diklat serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi :

- 
- a. Sekretariat DPRD
 - b. Inspektorat
 - c. Bappeda
 - d. BKD
 - e. BPBD
 - f. Kantor Kesbangpol

Fungsi Asisten Administrasi Umum sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja Asisten mengacu pada rencana strategis Sekretariat Daerah
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum pada urusan organisasi dan ketatalaksanaan, pelayanan publik, pelayanan interen, pelayanan barang dan jasa serta urusan penunjang keuangan, perencanaan, kepegawaian dan diklat serta pengkoordinasian perangkat daerah dilingkup tugasnya
- c. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan organisasi dan ketatalaksanaan, pelayanan publik, pelayanan interen pelayanan barang dan jasa serta urusan penunjang keuangan, perencanaan, kepegawaian dan diklat serta pengkoordinasian perangkat daerah dilingkup tugasnya
- d. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Berdasarkan penetapan kinerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh mempunyai indikator kinerja pelayanan, sebagaimana terlihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3
KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO	INDIKATOR (SPM/IKK/IKU)	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI			CATATAN
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	B	BB	BB	A	BB	BB	BB	A	A	A	
2	Nilai Evaluasi AKIP Setdako Inpektorat	Nilai	BB	BB	A	A	A	A	A	A	A	A	
3	Peringkat LPPD	Peringkat	20	18	16	15	15	19	30	15	13	12	
4	Persentase Jumlah Paket Lelang yang melalui Elektronik	Persentase	100%	100%	100%	100%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Kategori	79,35	79,85	80,35	80,75	79,7	80,35	81,66	80,75	81,35	81,85	
6	Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang diproses secara nonlitigasi	Persentase	50%	60%	70%	80%	100%	80%	60%	80%	85%	90%	
7	Persentase Lembaga Keagamaan (MUD) yang aktif	Persentase	20%	20%	40%	60%	60%	74.19%	60%	60%	80%	100%	
8	Persentase Peningkatan Zakat/Waqaf yang dikumpulkan oleh Lembaga/Badan Zakat/Waqaf	Persentase	3,00%	3,40%	3,80%	4,20%	3.50%	3.80%	4,78%	4.20%	4,60%	5.00%	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 8 (delapan) indikator sasaran Sekretariat Daerah yang ditargetkan ditahun 2019 secara umum telah tercapai, bahkan ada beberapa indikator yang tercapai melebihi target yang telah ditetapkan seperti Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai dengan indeks 81,66 dari 81,35 yang ditargetkan, persentase lembaga keagamaan (MUI) yang aktif tercapai 60% dari 40% yang ditargetkan, persentase peningkatan zakat/ wakaf yang dikumpulkan oleh lembaga/ badan zakat/ wakaf tercapai 4,78% dari yang ditargetkan sebesar 3,80%.

Namun terdapat juga indikator sasaran yang tidak mencapai target yaitu Persentase penyelesaian masalah hukum yang diproses secara nonlitigasi tahun 2019 sebesar 70% dan terealisasi 60% karena dari 5 kasus yang masuk hanya 3 kasus yang diselesaikan secara nonlitigasi sedangkan 2 kasus diteruskan ke pengadilan karena menyangkut tuntutan ganti rugi kepada pihak pemko dan dimenangkan oleh pihak pemko. Kemudian untuk pencapaian peringkat LPPD tahun 2019 ditargetkan berada diperingkat 16, dengan adanya instrumen-instrumen penilaian yang berbeda dari tahun lalu, pemerintah kota hanya mencapai peringkat 30, walaupun demikian secara perolehan nilai naik dari tahun lalu tapi tidak cukup untuk mendongkrak peringkat LPPD sesuai target yang diharapkan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan sarana prasarana. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang perlu dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuandi masa yang akan datang.

Berdasarkan pada uraian permasalahan diatas, maka isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh adalah:

Bagian Pemerintahan:

1. Belum dilaksanakannya pemasangan pilar batas antara Kota Payakumbuh dengan Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Belum tergambarinya secara administrasi batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Payakumbuh

3. Belum optimalnya kapasitas pemahaman aparaturnya pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan terutama dengan perubahan-perubahan aturan dan kebijakan tentang Kecamatan dan Kelurahan
4. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah umum di Kota Payakumbuh
5. Belum optimalnya inventarisasi data rupa bumi di Kota Payakumbuh
6. Belum optimalnya pemahaman SKPD terhadap indikator kinerja kunci (IKK) Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) tahun 2019

Bagian Kesra:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat dan wakafnya melalui lembaga resmi seperti, BAZNAS, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Payakumbuh.

Selama ini penerimaan zakat dan wakaf yang rutin membayar masih terbatas dari kalangan ASN saja, sedangkan untuk sektor swasta dan masyarakat umum masih belum rutin atau terkoordinir oleh lembaga resmi. Dalam satu tahun belakangan cenderung mengalami penurunan dalam pendapatan zakat dan wakaf oleh BAZNAS sehingga hal ini perlu mendapatkan perhatian dan komitmen bersama agar pengelolaan zakat dan wakaf di Kota Payakumbuh dapat lebih optimal. Namun secara total pendapatan zakat dan wakaf meningkat dari tahun sebelumnya yang disalurkan melalui lembaga keagamaan lainnya diluar Baznas.

2. Penguatan Peran Lembaga Keagamaan LPTQ dan MUI Kecamatan.

Secara umum lembaga keagamaan sudah berperan lebih baik, namun ada beberapa lembaga yang sebenarnya peran dan fungsinya sangat di harapkan dalam pembinaan keagamaan ditengah masyarakat, namun selama ini cenderung mengalami kefakuman dan kurang berperan, diantaranya LPTQ dan MUI Kecamatan. sehingga disaat penyelenggaraan MTQ kita sangat kesulitan mencari kafilah yang berkualitas dari lembaga-lembaga pendidikan Al Quran yang ada di Kota Payakumbuh. Begitupun MUI Kecamatan se Kota Payakumbuh, juga belum dirasakan perannya di tengah masyarakat sebagai wadah koordinasi ulama dalam pembinaan ummat.

3. Peningkatan fungsi Masjid sebagai sarana pemberdayaan ummat.

Dua tahun terakhir masjid-masjid yang ada di Kota Payakumbuh cenderung mengeliat, hal ini dilihat dari peningkatan jumlah jamaah shalat fardhu, namun mencermati potensi yang ada diharapkan kedepannya peran masjid tidak hanya sebagai sarana ibadah semata, tetapi diharapkan masjid bisa dijadikan sebagai salah satu pusat pemberdayaan kegiatan umat islam, dengan indicator minimal sebagai berikut:

- a. Masjid Sebagai Sarana Ibadah

Dilihat dari peningkatan jumlah jamaah shallat fardhu terutama subuh dan peningkatan kegiatan wirid pengajian rutin/tabigh akbar yang terprogram dan dikelola dengan baik.

b. Masjid Sebagai Sarana Pendidikan

Kedepannya seluruh masjid di Kota Payakumbuh memiliki lembaga pendidikan keagamaan seperti TPQ dan MDTA bahkan kalau memungkinkan memiliki lembaga pendidikan formal seperti TK Islam dan SD Islam. Selain itu juga diharapkan setiap masjid memiliki perhatian terhadap keberadaan remaja masjid dan pendidikan Al Quran pasca khatam.

c. Masjid Sebagai Sarana Penguatan Ekonomi Ummat.

Kedepannya masjid juga diharapkan memiliki program yang terstruktur dan dikelola dengan baik untuk pemberantasan kemiskinan dan pengayoman anak yatim/piatu yang tidak hanya bersifat insidentil, melainkan berkesinambungan dan terarah. Untuk itu setiap masjid diharapkan memiliki unit pengelola zakat (UPZ) yang permanent, dengan struktur organisasi dan program kerja yang tertata dan tidak hanya focus pada pengelolaan Zakat Fitrah di bulan Ramadhan, melainkan juga Zakat Mal, Infaq, Sedekah dan Wakaf.

Bagian Hukum:

1. Masih adanya kasus-kasus yang terkait dengan Pemerintahan yang perlu dilakukan advokasi dan sosialisasi.
2. Koordinasi antara sesama Lembaga Penegak Hukum seperti Kejaksaan Negeri, Kepolisian, dan Lembaga Pengadilan dengan Pemerintah Kota Payakumbuh khususnya Bagian Hukum sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Sedangkan koordinasi antar lembaga sangat diperlukan untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum dan perlu penguatan koordinasi agar lebih optimal dan dicarikan solusinya secara komprehensif bersama stakeholder terkait. Koordinasi antara Lembaga Hukum dilakukan oleh Tim Advokasi yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota.
Kurangnya koordinasi antara Lembaga disebabkan masih kurangnya kuantitas pertemuan Tim Advokasi yang disebabkan karena kurangnya dana pendukung untuk melakukan pertemuan tersebut. Disamping itu, anggota Tim Advokasi belum melakukan tugas pokok dan fungsi secara maksimal
3. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum masih terbatas. Akibatnya sedikit sekali Peraturan Perundang-undangan yang disampaikan kepada masyarakat sehingga berdampak pada

- minimnya pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Perundang-undangan yang ada, baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah.
4. Pembentukan Tim Pembahasan Ranperda
Tim yang bertugas membahas Perda sebelum dilimpahkan ke DPRD baik secara kuantitas maupun kualitas masih terbatas, untuk itu perlu dilakukan peningkatan yang lebih komprehensif dengan jalan, melakukan fasilitasi pembahasan perda dengan pihak Kemenkumham Provinsi Sumatera Barat dan Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat
 5. Masalah Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan
Jika dilihat dari resiko terhadap kegiatan yang dilakukan tidak seimbang dengan dana yang tersedia. Namun kegiatan ini berdampak terhadap hukum/ timbul masalah hukum terutama terhadap Keputusan Walikota yang dikaji. Apalagi Keputusan yang diterbitkan secara umum untuk melaksanakan APBD. Kendala lain yang dihadapi pada kegiatan ini adalah adanya beberapa SKPD yang tidak berkoordinasi dengan Bagian Hukum untuk menandatangani Produk Hukum yang dibuat sehingga ketika persoalan muncul adakalanya bagian hukum tidak mengetahui
 6. Berdasarkan Amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 maka perlu adanya pengayoman hukum bagi masyarakat miskin yang tersandung hukum dan perlu diberikan bantuan hukum. Untuk itu Pemerintah Kota Payakumbuh perlu merancang Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. Dilaksanakan tahun 2021, selain itu juga telah dirancang pelaksanaan anggarannya melalui RKA tahun 2021
 7. Sesuai amanat Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap permasalahan HAM, dimana setiap daerah perlu membentuk Unit Pelayanan dimaksud sehingga Perlindungan HAM bagi Masyarakat dapat dilaksanakan.
Tahun 2017, 2018 dan 2019 Kota Payakumbuh telah mendapatkan penghargaan dari Kemenkumham sebagai Kota Peduli HAM, namun untuk capaian kinerjanya perlu lebih dioptimalisasikan sesuai tuntutan Undang-undang dan kebutuhan masyarakat. Untuk tahun mendatang Yankomas ini perlu dibentuk
 8. Masalah dokumentasi hukum, melalui jaringan dokumentasi informasi hukum, (JDIH) Bagian Hukum Kota Payakumbuh telah mendapat penghargaan dari Kemenkumham sebagai pengelola JDIH terintegrasi. Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Untuk itu pada tahun-tahun mendatang perlu optimalisasi

pelaksanaan dan pemanfaatan JDIIH sebagai pusat informasi hukum melalui jaringan/online yang dapat diperoleh oleh masyarakat atau SKPD setiap membutuhkan

Bagian Perekonomian:

1. Sering terjadinya kelangkaan BBM (Bensin,Solar,Pertamax) serta LPG 3 KG yang disebabkan oleh terganggunya pasokan dari PT. Pertamina, adanya spekulasi LPG 3 KG ditingkat pangkalan dan agen sehingga tidak tepat sasaran sampai ke konsumen
2. Dibidang Ketenagalistrikan masih banyaknya bangunan milik Pemerintah, Fasilitas Umum dan Milik Masyarakat yang instalasi listriknya sudah berusia diatas 15 tahun yang bisa berakibat menimbulkan kebakaran karena sudah tidak layak operasi.
3. Masih relatif rendahnya koordinasi antar SKPD sektor ekonomi dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan bidang ekonomi di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
4. Sering terjadinya overlapping program dan kegiatan akibat kurangnya koordinasi antar SKPD
5. Masih terbatasnya pemasaran hasil produk UMKM di Kota Payakumbuh, sehingga perkembangan kegiatan usaha sektor ini kurang memberikan nilai tambah bagi perekonomian Kota Payakumbuh.
6. Rendahnya tingkat interaksi langsung antara pelaku usaha, pembeli dan pemerintah dalam memasarkan produk yang dihasilkan dan produk unggulan Kota Payakumbuh kurang dikenal.
7. Masih kurangnya informasi yang terpublikasi ke masyarakat tentang Perkembangan Produksi Daerah Sektor Ekonomi yang di Kota Payakumbuh.
8. Belum maksimalnya pengkajian dan analisa produksi daerah sektor ekonomi yang menghasilkan data valid sebagai dasar pembuatan kebijakan bidang ekonomi.
9. Mengendalikan harga pada level rendah dan stabil melalui berbagai kebijakan pengendalian inflasi
10. Karena Kota Payakumbuh bukan termasuk Kota Sampel Inflasi sehingga perhitungan tingkat inflasi Kota Payakumbuh masih merujuk ke Kota Padang dan Bukittinggi
11. Perlu adanya data yang valid dan terintegrasi terutama data produksi dan data kebutuhan konsumsi di Kota Payakumbuh sehingga bisa diketahui ketersediaan pasokan yang digunakan dalam rangka merumuskan kebijakan pengendalian inflasi yang akan diambil
12. Perlu adanya kerjasama perdagangan antar daerah dalam rangka mencukupi pasokan pangan

13. Keterlibatan dan peranan tokoh masyarakat, pengusaha, pihak swasta dan pelaku ekonomi lainnya belum terfasilitasi secara maksimal dalam rangka pengembangan ekonomi daerah Kota Payakumbuh.
14. Interaksi dan Koordinasi dengan lembaga non pemerintah merupakan suatu yang sangat penting dalam mewujudkan suatu perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodir semua kepentingan masyarakat
15. Perlu adanya suatu lembaga yang bisa dijadikan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah, salah satunya melalui pembentukan BUMD di Kota Payakumbuh
16. Tujuan pembentukan BUMD bukan hanya *profit oriented* namun juga mengedepankan aspek sosial kemasyarakatan

Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan Pengendalian Pembangunan

1. Masih rendahnya kesadaran pengelola kegiatan terhadap tugas dan tanggung jawabnya
2. Masih rendahnya pemahaman pengelola kegiatan terhadap pelaksanaan tertib administrasi pembangunan dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh
3. Dibutuhkan biaya operasional untuk pelaksanaan penyelenggaraan unit pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) agar pelaksanaan e-procurement di Kota Payakumbuh dapat berjalan optimal
4. Dibutuhkan biaya operasional untuk pelaksanaan penyelenggaraan unit pengelolaan pengadaan barang/jasa yang akan melaksanakan pengadaan barang/ jasa di Kota Payakumbuh
5. Peningkatan kualitas SDM Pokja Unit Pengadaan Barang/ Jasa terkait peralihan status pokja menjadi fungsional tertentu dan perubahan peraturan tentang pengadaan.

Bagian Perencanaan dan Anggaran:

1. Belum optimalnya koordinasi masing-masing bagian dalam hal mengumpulkan bahan perencanaan, keuangan dan evaluasi dan pelaporan.
2. Rendahnya pemahaman aparatur terhadap tugas dan fungsinya disebabkan minimnya diklat-diklat fungsional.
3. Kurangnya kuantitas sumber daya aparatur, berakibat kepada rangkap jabatan dan lambatnya penyelesaian tugas.

Bagian Organisasi :

1. Belum optimalnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mulai dari perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja, hingga evaluasi kinerja yang dikarenakan perbedaan pemahaman dan persepsi diantara unsur

- pemerintah daerah dan belum terintegrasinya sistem aplikasi perencanaan, keuangan dan pelaporan
2. Ketersediaan sumberdaya manusia aparatur yang memiliki kompetensi masih minim. Hal tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kapabilitas dan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan.
 3. Pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsinya masih belum optimal. Sehingga menyebabkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran SKPD tidak optimal.
 4. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan (SP), SOP di masing-masing Perangkat Daerah sehingga mempengaruhi nilai Survey Kepuasan Masyarakat
 5. Kelembagaan Perangkat Daerah yang ada saat ini masih belum optimal dalam mewujudkan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran, masih banyak tipe perangkat daerah yang tidak sesuai dengan beban tugas yang diemban, permasalahan kelembagaan rumah sakit yang masih menunggu Pepres, kelembagaan Kesbangpol yang belum jelas dan masalah terkait kelembagaan lainnya
 6. Belum optimalnya pelaksanaan Anjab, ABK dan Evjab sehingga belum cukup untuk dijadikan dasar yang valid untuk manajemen kepegawaian mulai dari perencanaan pegawai, rekrutmen, manajemen karir, diklat, hingga penilaian dan pemberian tunjangan kinerja atau remunerasi
 7. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) di Kota Payakumbuh

Bagian Umum:

1. Aspek Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik merupakan hal penting seiring tingginya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari Pemerintah. Pelayanan yang diberikan bagian umum yakni persuratan beserta distribusinya, transportasi untuk kedinasan maupun masyarakat, pemakaian ruangan beserta fasilitasnya serta pelayanan pada rumah dinas Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah. Oleh sebab itu, Bagian Umum akan terus meningkatkan pelayanan untuk menunjang kinerja pemerintah

2. Aspek Sumber Daya Manusia

Dari segi kualitas SDM yang tersedia tidak sebanding dengan beban tugas bagian umum yang cukup besar dan luasnya ruang lingkup pekerjaan. Luasnya lingkup pekerjaan bagian umum menuntut tersedianya tenaga-tenaga yang memiliki kemampuan atau skill khusus seperti teknisi maupun tenaga administrasi. Dari segi jumlah SDM yang dimiliki bagian umum masih kurang, yang mana pada kegiatan tertentu sering terjadi rangkap pekerjaan

3. Aspek Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana maupun peralatan dan perlengkapan yang dikuasai bagian umum untuk kebutuhan kantor dan ruang dinas masih terbatas dari segi jumlah dan kualitas. Permasalahan juga muncul dari segi pemeliharaan sarana dan prasarana serta peralatan dan perlengkapan tersebut karena terbatasnya dana pendukung.

Bagian Protokoler dan Dokumentasi :

Ketersediaan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dibidang protokoler masih minim. Hal tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kapabilitas dan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan tugas-tugas pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.

2.4 Review terhadap RKPD Tahun 2021

Dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD ditemukan beberapa perbedaan dengan kebutuhan Renja Sekretariat Daerah tahun 2021 sebagaimana terdapat pada table 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 dibawah ini:

Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2021
KOTA PAYAKUMBUH

NO	RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2021					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KESEKRETARIATAN DAERAH				36,055,595,007	KESEKRETARIATAN DAERAH				27,603,858,721	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Nilai AKIP	A	25,052,891,215	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Nilai AKIP	A	20,218,046,574	
			Nilai Evaluasi AKIP Setdako oleh Inspektorat IKM	A	81,35			Nilai Evaluasi AKIP Setdako oleh Inspektorat IKM	A	81,35	
1.1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan penyelesaian dokumen SAKIP Setdako sesuai pedoman	100%	60,000,000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan penyelesaian dokumen SAKIP Setdako sesuai pedoman	100%	33,000,000	
			Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja yang selaras dengan Renstra	100%				Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja yang selaras dengan Renstra	100%		
			IKM Sekretariat Daerah	81,35				IKM Sekretariat Daerah	81,35		
			Persentase pemenuhan kebutuhan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%				Persentase pemenuhan kebutuhan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%		
			Persentase layanan perkantoran yang terfasilitasi dengan baik	100%				Persentase layanan perkantoran yang terfasilitasi dengan baik	100%		
			Persentase sarana dan prasarana kantor serta rumah dinas yang terpelihara dengan baik	85%				Persentase sarana dan prasarana kantor serta rumah dinas yang terpelihara dengan baik	85%		
			Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan perundang-undangan yang berlaku	100%				Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan perundang-undangan yang berlaku	100%		
			Persentase dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu	100%				Persentase dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu	100%		
			Persentase Ketersediaan dokumen Pelayanan Publik	100%				Persentase Ketersediaan dokumen Pelayanan Publik	100%		
1.1.1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	2 dokumen	15,000,000	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	2 dokumen	10,000,000	
1.1.2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan		Jumlah dokumen perencanaan RKA dan DPA yang disusun	2 dokumen	15,000,000						

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi, pelaporan dan dokumen pelayanan publik yang disusun	7 dokumen	15,000,000	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi, pelaporan dan dokumen pelayanan publik yang disusun	7 dokumen	15,000,000	
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah rapat-rapat evaluasi kinerja yang dilaksanakan	4 kali	15,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah rapat-rapat evaluasi kinerja yang dilaksanakan	4 kali	8,000,000	
1.2	Administrasi Keuangan		Persentase kesesuaian penatausahaan keuangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	10,926,578,149	Administrasi Keuangan		Persentase kesesuaian penatausahaan keuangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	10,713,007,008	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		jumlah asn yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	85 orang	10,926,578,149	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		jumlah asn yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	85 orang	10,713,007,008	
1.3	Administrasi Umum		Persentase layanan umum yang dilakukan dengan baik	90%	13,910,813,066	Administrasi Umum		Persentase layanan umum yang dilakukan dengan baik	90%	9,316,539,566	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	100 unit				Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	100 unit		
			Jumlah asset lingkup Setdako yang tercatat	1502 unit				Jumlah asset lingkup Setdako yang tercatat	1502 unit		
			Persentase kendaraan dinas roda dua dan roda empat dalam kondisi baik	90%				Persentase kendaraan dinas roda dua dan roda empat dalam kondisi baik	90%		
			Persentase pelayanan kedinasan/ tamu kepala daerah yang terlayani dengan baik	85%				Persentase pelayanan kedinasan/ tamu kepala daerah yang terlayani dengan baik	85%		
			Persentase pelayanan rumah tangga Kepala Daeran dengan baik	85%				Persentase pelayanan rumah tangga Kepala Daeran dengan baik	85%		
			Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas	100%				Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas	100%		
			Persentase capaian kinerja program/ kegiatan	90%				Persentase capaian kinerja program/ kegiatan	90%		
1.3.1	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah benda pos yang tersedia dan jumlah surat yang terkirim	3.400 Lembar	19,998,000	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah benda pos yang tersedia dan jumlah surat yang terkirim	3.400 Lembar	19,998,000	
1.3.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah rekening telepon, air, televisi berlangganan dan listrik yang dibavarkan	4 Rekening	1,100,000,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah rekening telepon, air, televisi berlangganan dan listrik yang dibavarkan	4 Rekening	1,109,000,000	
1.3.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Persentase lancarnya aktivitas perkantoran	100%	512,735,000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Persentase lancarnya aktivitas perkantoran	100%	306,132,500	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.4						Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS		persentase ASN dan kepala daerah yang dibayarkan jaminan pemeliharaan kesehatan	100%	1,000,000	
1.3.5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah		Pembayaran honor THL pengamanan sarana dan prasarana kantor dan rumah dinas	2 orang	89,425,476	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah		Pembayaran honor THL pengamanan sarana dan prasarana kantor dan rumah dinas	2 orang	89,425,476	
1.3.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan dinas operasional yang pajaknya dibayarkan	85 Unit	601,042,460	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan dinas operasional yang pajaknya dibayarkan	85 Unit	601,042,460	
1.3.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Jumlah penyedia administrasi keuangan yang dibayarkan	84 orang	657,376,450	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Jumlah penyedia administrasi keuangan yang dibayarkan	84 orang	568,000,000	
1.3.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Jumlah jasa kebersihan yang tersedia	12 bln	1,793,580,000	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Jumlah jasa kebersihan yang tersedia	12 bln	1,792,580,000	
1.3.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	30 unit	19,994,610	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	30 unit	19,994,610	
1.3.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	45 item	34,345,575	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	45 item	34,354,575	
1.3.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	13 item	60,721,915	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	13 item	60,721,915	
1.3.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	1039 unit	75,000,000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	1039 unit	43,381,500	
1.3.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	3 unit	56,206,300	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	3 unit	36,206,300	
1.3.14	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 jenis buku	7,000,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 jenis buku	7,000,000	
1.3.15	Penyediaan makanan dan minuman		Jumlah makan dan minum yang disediakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas	2500 porsi	1,212,570,000	Penyediaan makanan dan minuman		Jumlah makan dan minum yang disediakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas	2500 porsi	1,000,000,000	
1.3.16	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	430 kali	1,973,293,000	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	430 kali	1,170,000,000	
1.3.17	Pengadaan Mobil Jabatan		Jumlah mobil jabatan yang diadakan	5 Unit	350,000,000						

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.18	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	5 Unit	645,782,500	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	5 Unit	-	
1.3.19	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas		Jumlah perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang di sediakan	3 unit	630,308,250	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas		Jumlah perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang di sediakan	3 unit	250,000,000	
1.3.20	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Jumlah perlengkapan gedungkantor yang di adakan	1 unit	1,689,700,000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Jumlah perlengkapan gedungkantor yang di adakan	1 unit	216,050,000	
1.3.21	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas		Jumlah peralatan rumah jabatan/ dinas yang di sediakan	5 Unit	340,558,000	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas		Jumlah peralatan rumah jabatan/ dinas yang di sediakan	5 Unit	282,368,000	
1.3.22	Pengadaan peralatan gedung kantor		Jumlah peralatan gedung kantor yang di sediakan	1 unit	74,100,000	Pengadaan peralatan gedung kantor		Jumlah peralatan gedung kantor yang di sediakan	1 unit	74,100,000	
1.3.23	Pengadaan mebeleur		Jumlah meubeleur yang disediakan	2 unit	190,000,000						
1.3.24	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan		Jumlah Rumah jabatan yang di lakukan pemeliharaan	3 unit	313,650,000	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan		Jumlah Rumah jabatan yang di lakukan pemeliharaan	3 unit	282,492,350	
1.3.25	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Jumlah pemeliharaan rutin kantor	1 unit	129,700,000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Jumlah pemeliharaan rutin kantor	1 unit	129,700,000	
1.3.26	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan		Jumlah pemeliharaan rutin Mobil Jabatan	5 Unit	300,000,000	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan		Jumlah pemeliharaan rutin Mobil Jabatan	5 Unit	300,000,000	
1.3.27	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		jumlah kendaraan dinas / operasional yang di lakukan pemeliharaan	80 unit	691,233,280	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		jumlah kendaraan dinas / operasional yang di lakukan pemeliharaan	80 unit	691,233,280	
1.3.28	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas		Jumlah Perlengkapan rumah jabatan yang di lakukan pemeliharaan rutin	3 Unit	37,494,000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas		Jumlah Perlengkapan rumah jabatan yang di lakukan pemeliharaan rutin	3 Unit	21,848,400	
1.3.29	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Jumlah perlengkapan gedunbg kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin.	1 unit gedung	150,000,000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Jumlah perlengkapan gedunbg kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin.	1 unit gedung	125,500,000	
1.3.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas		Jumlah peralatan rumah jabatan / dinas yang dilakukan pemeliharaan rutin	50 unit	79,998,250	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas		Jumlah peralatan rumah jabatan / dinas yang dilakukan pemeliharaan rutin	50 unit	42,025,350	
1.3.31	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Jumlah peralatan rumah jabatan / dinas yang di lakukan pemeliharaan rutin	10 unit	75,000,000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Jumlah peralatan rumah jabatan / dinas yang di lakukan pemeliharaan rutin	10 unit	40,384,850	
1.3.32	Rehab sedang/ berat rumah dinas		Jumlah fasilitas rumah dinas yang direhab	-	-	Rehab sedang/ berat rumah dinas		Jumlah fasilitas rumah dinas yang direhab	3 unit	1,000,000	
1.3.33	Rehab sedang/ berat gedung kantor		Jumlah gedung kantor yang di rehab	-	-	Rehab sedang/ berat gedung kantor		Jumlah gedung kantor yang di rehab	1 unit	1,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase layanan umum yang dilakukan dengan baik	90%	155,500,000	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase layanan umum yang dilakukan dengan baik	90%	155,500,000	
1.4.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Jumlah pakaian dinas yang disediakan	210 Stel	155,500,000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Jumlah pakaian dinas yang disediakan	210 Stel	155,500,000	
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Peringkat LPPD	13	4,832,600,145	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Peringkat LPPD	13	2,585,374,232	
			Persentase lembaga keagamaan (MUI) yang aktif	85%				Persentase lembaga keagamaan (MUI) yang aktif	85%		
			Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga/bada zakat/wakaf	4,60%				Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga/bada zakat/wakaf	4,60%		
			Persentase penyelesaian masalah hukum yang diroses secara non litigasi	85%				Persentase penyelesaian masalah hukum yang diroses secara non litigasi	85%		
			Nilai LPPD Kota Payakumbuh	3				Nilai LPPD Kota Payakumbuh	3		
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang baik	100%				Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang baik	100%		
			Persentase masalah kewilayahan yang ditangani	90%				Persentase masalah kewilayahan yang ditangani	90%		
			Persentase Organisasi Sosial Yang Aktif	77%				Persentase Organisasi Sosial Yang Aktif	77%		
			Persentase masjid yang dikelola secara optimal	15%				Persentase masjid yang dikelola secara optimal	15%		
			Persentase Pegawai Negeri Sipil yang menyalurkan zakat/wakaf melalui lembaga badan zakat/wakaf	80%				Persentase Pegawai Negeri Sipil yang menyalurkan zakat/wakaf melalui lembaga badan zakat/wakaf	80%		
			Persentase MUI Kecamatan dan Lembaga Keagamaan Pendukung MUI yang aktif	80%				Persentase MUI Kecamatan dan Lembaga Keagamaan Pendukung MUI yang aktif	80%		
			Jumlah sekolah/ madrasah yang meningkat strata UKS/M pada tahun n	4 sekolah				Jumlah sekolah/ madrasah yang meningkat strata UKS/M pada tahun n	4 sekolah		
			Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan	100%				Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan	100%		
			Persentase kasus bantuan hukum yang tertangani	75%				Persentase kasus bantuan hukum yang tertangani	75%		
			Persentase perda yang dibahas di DPRD setelah diusulkan pemrakarsa	80%				Persentase perda yang dibahas di DPRD setelah diusulkan pemrakarsa	80%		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan ke masyarakat	100%				Persentase peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan ke masyarakat	100%		
2.1	Administrasi dan Tata Pemerintahan		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%	1,760,243,625	Administrasi dan Tata Pemerintahan		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%	947,858,982	
			Persentase LPM yang berprestasi	100%				Persentase LPM yang berprestasi	100%		
			Persentase penyelenggaraan kelurahan dalam kategori baik	100%				Persentase penyelenggaraan kelurahan dalam kategori baik	100%		
			Persentase RT/RW yang tertib administrasi	80%				Persentase RT/RW yang tertib administrasi	80%		
			Persentase permasalahan tapal batas yang terselesaikan	80%				Persentase permasalahan tapal batas yang terselesaikan	80%		
			Persentase data rupa bumi yang diinventarisir	50%				Persentase data rupa bumi yang diinventarisir	50%		
			Persentase Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik	100%				Persentase Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik	100%		
			Persentase Camat dan Lurah yang berprestasi tingkat Pavakumbuh	100%				Persentase Camat dan Lurah yang berprestasi tingkat Pavakumbuh	100%		
			Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan tepat waktu	5 dok				Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan tepat waktu	5 dok		
2.1.1	Penataan Administrasi Pemerintahan		Pelaksanaan kegiatan pembinaan lembaga/ organisasi masyarakat	1 kegiatan	800,196,445	Penataan Administrasi Pemerintahan		Pelaksanaan kegiatan pembinaan lembaga/ organisasi masyarakat	1 kegiatan	398,945,202	
			Pelaksanaan pembinaan dan lomba LPM berprestasi	1 kegiatan				Pelaksanaan pembinaan dan lomba LPM berprestasi	1 kegiatan		
			Pelaksanaan lomba kelurahan berprestasi	1 kegiatan				Pelaksanaan lomba kelurahan berprestasi	1 kegiatan		
			Jumlah dokumen adm RT/RW di Kota Pavakumbuh	1 dokumen				Jumlah dokumen adm RT/RW di Kota Pavakumbuh	1 dokumen		
2.1.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah dokumen tapal batas yang diinventarisir	2 dokumen	568,247,065	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah dokumen tapal batas yang diinventarisir	2 dokumen	173,913,780	
			Jumlah dokumen data rupa bumi yang diinventarisir	2 dokumen				Jumlah dokumen data rupa bumi yang diinventarisir	2 dokumen		
			Jumlah peserta Pelatihan Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	52 orang				Jumlah peserta Pelatihan Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	52 orang		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Terpilihnya camat dan lurah terbaik di Kota Payakumbuh	2 orang				Terpilihnya camat dan lurah terbaik di Kota Payakumbuh	2 orang		
2.1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan tepat waktu	5 dokumen	391,800,115	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan tepat waktu	5 dokumen	375,000,000	
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakvat		Persentase peningkatan Kompetensi Guru TPQ/ MDTA	80%	2,337,356,520	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakvat		Persentase peningkatan Kompetensi Guru TPQ/ MDTA	80%	1,145,015,250	
			Jumlah Lembaga Didikan Subuh yang difasilitasi dan dibina	6 LDS				Jumlah Lembaga Didikan Subuh yang difasilitasi dan dibina	6 LDS		
			Jumlah kegiatan pembinaan pendidikan keagamaan yang difasilitasi	2 Kali				Jumlah kegiatan pembinaan pendidikan keagamaan yang difasilitasi	2 Kali		
			Jumlah Masjid yang melaksanakan Magrib Mengai	48 Masjid				Jumlah Masjid yang melaksanakan Magrib Mengai	48 Masjid		
			Persentase Masjid yang memiliki imam dan khatib tetap	50%				Persentase Masjid yang memiliki imam dan khatib tetap	50%		
			Jumlah Masjid Yang dikunjungi Tim Ramadhan	20 Masjid				Jumlah Masjid Yang dikunjungi Tim Ramadhan	20 Masjid		
			Jumlah Kampung al Qur'an yang dibina	1 Kampung Al Quran				Jumlah Kampung al Qur'an yang dibina	1 Kampung Al Quran		
			Persentase terlaksananya cabang perlombaan MTQ Nasional Tk. Kota	100%				Persentase terlaksananya cabang perlombaan MTQ Nasional Tk. Kota	100%		
			Jumlah MUI Kecamatan dan Lembaga Keagamaan Pendukung MUI yang terfasilitasi	6 lembaga				Jumlah MUI Kecamatan dan Lembaga Keagamaan Pendukung MUI yang terfasilitasi	6 lembaga		
			Persentase proposal bantuan hibah yang diproses	100%				Persentase proposal bantuan hibah yang diproses	100%		
			Persentase organisasi sosial yang dibina dan difasilitasi	80%				Persentase organisasi sosial yang dibina dan difasilitasi	80%		
			Jumlah ASN yang menyalurkan zakat/ wakaf selama tahun n	2.400 ASN				Jumlah ASN yang menyalurkan zakat/ wakaf selama tahun n	2.400 ASN		
			Jumlah sekolah/ madrasah yang mengikuti lomba UKS Tk. Propinsi pada tahun n	4 Sekolah				Jumlah sekolah/ madrasah yang mengikuti lomba UKS Tk. Propinsi pada tahun n	4 Sekolah		
2.2.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah pelatihan kompetensi guru TPQ/MDTA yang dilaksanakan	1 kali	1,538,488,750	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah pelatihan kompetensi guru TPQ/MDTA yang dilaksanakan	1 kali	400,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Lembaga Didikan Subuh yang difasilitasi dan dibina	6 LDS				Jumlah Lembaga Didikan Subuh yang difasilitasi dan dibina	6 LDS		
			Jumlah koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang pendidikan keagamaan	4 kali				Jumlah koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang pendidikan keagamaan	4 kali		
			Jumlah sosialisasi pencanangan maghrib mengaji yang dilaksanakan	1 kali				Jumlah sosialisasi pencanangan maghrib mengaji yang dilaksanakan	1 kali		
			Jumlah pelaksanaan pelatihan imam dan khatib yang dilaksanakan	1 kali				Jumlah pelaksanaan pelatihan imam dan khatib yang dilaksanakan	1 kali		
			Pelaksanaan persiapan kunjungan tim ramadhan yang dilaksanakan	2 kali				Pelaksanaan persiapan kunjungan tim ramadhan yang dilaksanakan	2 kali		
			Pelaksanaan pembinaan terhadap kampung Al Quran yang telah ditetapkan	1 kegiatan				Pelaksanaan pembinaan terhadap kampung Al Quran yang telah ditetapkan	1 kegiatan		
			Jumlah Cabang MTQ yang dilombakan	18 cabang				Jumlah Cabang MTQ yang dilombakan	18 cabang		
			Jumlah MUI Kecamatan dan lembaga pendukung MUI yang terfasilitasi kegiatannya	5 MUI Kecamatan				Jumlah MUI Kecamatan dan lembaga pendukung MUI yang terfasilitasi kegiatannya	5 MUI Kecamatan		
			Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi hibah bansos	12 kali				Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi hibah bansos	12 kali		
2.2.2	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah organisasi sosial yang dilakukan pembinaan		408,333,520	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah organisasi sosial yang dilakukan pembinaan		444,481,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.3	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah rakor UKS TK Kecamatan yang dilaksanakan 2. Jumlah Rakerda UKS TK Kota yang dilaksanakan 3. Jumlah Rakerda UKS TK Propinsi yang diikuti 4. Jumlah sekolah yang dibina untuk lomba sekolah sehat TK. Provinsi 5. Jumlah sekolah yang dibina untuk lomba sekolah sehat tk nasional 6. Jumlah sekolah yang dibina untuk lomba sekolah sehat TK Kota 7. Jumlah peserta yang difasilitasi untuk mengikuti jambore UKS tk propinsi dan nasional	1 kali 1 kali 1 kali 4 sekolah 16 sekolah 9 orang	390,534,250	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah rakor UKS TK Kecamatan yang dilaksanakan 2. Jumlah Rakerda UKS TK Kota yang dilaksanakan 3. Jumlah Rakerda UKS TK Propinsi yang diikuti 4. Jumlah sekolah yang dibina untuk lomba sekolah sehat TK. Provinsi 5. Jumlah sekolah yang dibina untuk lomba sekolah sehat tk nasional 6. Jumlah sekolah yang dibina untuk lomba sekolah sehat TK Kota 7. Jumlah peserta yang difasilitasi untuk mengikuti jambore UKS tk propinsi dan nasional	1 kali 1 kali 1 kali 4 sekolah 16 sekolah 9 orang	300,534,250	
2.3	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah		Persentase rancangan produk hukum daerah yang diharmonisasi	100%	495,000,000	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah		Persentase rancangan produk hukum daerah yang diharmonisasi	100%	470,000,000	
			Jumlah ranperda yang diusulkan untuk dibahas pada tahun n	6 buah				Jumlah ranperda yang diusulkan untuk dibahas pada tahun n	6 buah		
			Jumlah perda yang dibahas di DPRD	6 buah				Jumlah perda yang dibahas di DPRD	6 buah		
			Jumlah produk hukum yang ditetapkan : - Perda - Perwako	6 Perda 50 Perwako 800 SK				Jumlah produk hukum yang ditetapkan : - Perda - Perwako	6 Perda 50 Perwako 800 SK		
			Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti terkait masalah hukum	3 permasalahan				Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti terkait masalah hukum	3 permasalahan		
			Jumlah bantuan hukum yang diberikan untuk masyarakat miskin	4 perkara				Jumlah bantuan hukum yang diberikan untuk masyarakat miskin	4 perkara		
			Jumlah rencana aksi penyelesaian masalah hukum yang ditidakiikuti	2 kegiatan				Jumlah rencana aksi penyelesaian masalah hukum yang ditidakiikuti	2 kegiatan		
			Jumlah sosialisasi hukum dan peraturan Perundang-undangan	2 kali				Jumlah sosialisasi hukum dan peraturan Perundang-undangan	2 kali		
			Jumlah pembuatan lembaran daerah, berita daerah, panduan hukum	100 buku				Jumlah pembuatan lembaran daerah, berita daerah, panduan hukum	100 buku		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan melalui JDIH	56 peraturan				Jumlah peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan melalui JDIH	56 peraturan		
2.3.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan	6 Ranperda	105,000,000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan	6 Ranperda	70,000,000	
			Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	2 kali				Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	2 kali		
			Jumlah peraturan perundang-undangan yang diterbitkan	3 kajian				Jumlah peraturan perundang-undangan yang diterbitkan	3 kajian		
2.3.2	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah perkara hukum yang ditangani	3 perkara	315,000,000	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah perkara hukum yang ditangani	3 perkara	330,000,000	
			Jumlah perkara masyarakat miskin yang mendapat Bantuan Hukum	4 perkara				Jumlah perkara masyarakat miskin yang mendapat Bantuan Hukum	4 perkara		
2.3.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dipublikasikan	100 peraturan	75,000,000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dipublikasikan	100 peraturan	70,000,000	
			Jumlah produk hukum yang dikelola dgn baik					Jumlah produk hukum yang dikelola dgn baik			
2.4	Fasilitasi Kerjasama Daerah		Persentase MoU yang ditindaklanjuti dengan Perianjian Kerjasama	100%	240,000,000	Fasilitasi Kerjasama Daerah		Persentase MoU yang ditindaklanjuti dengan Perianjian Kerjasama	100%	22,500,000	
2.4.1	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri		Jumlah MoU/PKS Dalam Negeri yang difasilitasi	5 MoU/PKS	100,000,000	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri		Jumlah MoU/PKS Dalam Negeri yang difasilitasi	5 MoU/PKS	15,000,000	
2.4.2	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri		Jumlah MoU/PKS Luar Negeri yang difasilitasi	1 MoU/PKS	100,000,000						
2.4.3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Jumlah dokumen evaluasi kerjasama yang disusun	1 dokumen	40,000,000	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Jumlah dokumen evaluasi kerjasama yang disusun	1 dokumen	7,500,000	
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase jumlah paket lelang yang melalui elektronik	100%	1,081,388,800	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase jumlah paket lelang yang melalui elektronik	100%	865,000,000	
			IKM	81,35				IKM	81,35		
			Persentase pengelolaan kegiatan yang tertib administrasi sesuai aturan	100%				Persentase pengelolaan kegiatan yang tertib administrasi sesuai aturan	100%		
			Persentase tender/seleksi yang terselesaikan melalui UKPBJ	100%				Persentase tender/seleksi yang terselesaikan melalui UKPBJ	100%		
			Persentase terlaksananya strategi pengendalian inflasi	100%				Persentase terlaksananya strategi pengendalian inflasi	100%		
			Persentase terlaksananya penyajian data/ informasi bidang ekonomi	100%				Persentase terlaksananya penyajian data/ informasi bidang ekonomi	100%		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase terlaksananya kebijakan ekonomi & SD energi dan mineral	100%				Persentase terlaksananya kebijakan ekonomi & SD energi dan mineral	100%		
			Persentase BUMD yang sehat dan menguntungkan	100%				Persentase BUMD yang sehat dan menguntungkan	100%		
3.1	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Persentase rekomendasi kebijakan stabilisasi harga nasar	80%	231,388,800	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Persentase rekomendasi kebijakan stabilisasi harga nasar	80%	170,000,000	
			Jumlah dokumen pembentukan dan pembinaan BUMD	2 dokumen				Jumlah dokumen pembentukan dan pembinaan BUMD	2 dokumen		
			Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindak lanjuti	80%				Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindak lanjuti	80%		
			Persentase lembaga yang memanfaatkan data perkembangan produksi daerah	80%				Persentase lembaga yang memanfaatkan data perkembangan produksi daerah	80%		
3.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Jumlah pembinaan, pengawasan dan monitoring BUMD dan BLUD	4 Kali	94,256,500	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Jumlah pembinaan, pengawasan dan monitoring BUMD dan BLUD	4 Kali	80,000,000	
3.1.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi, pengendalian inflasi	12 Kali	137,132,300	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi, pengendalian inflasi	12 Kali	90,000,000	
			Jumlah Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	5 kali				Jumlah Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	5 kali		
			Jumlah Buku Produksi Daerah Bidang Ekonomi Yang Disusun	4 Dokumen				Jumlah Buku Produksi Daerah Bidang Ekonomi Yang Disusun	4 Dokumen		
3.2	Administrasi Pembangunan		Persentase pencapaian realisasi fisik kegiatan pembangunan	100%	55,000,000	Administrasi Pembangunan		Persentase pencapaian realisasi fisik kegiatan pembangunan	100%	35,000,000	
3.2.1	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang disusun	12 dokumen	55,000,000	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang disusun	12 dokumen	35,000,000	
3.3	Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui ULP	100%	775,000,000	Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui ULP	100%	650,000,000	
			Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui LPSE	100%				Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui LPSE	100%		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.3.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	525,000,000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	420,000,000	
3.3.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		persentase paket pengadaan barang/jasa yang metode pelaksanaannya wajib dilakukan melalui LPSE	100%	250,000,000	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		persentase paket pengadaan barang/jasa yang metode pelaksanaannya wajib dilakukan melalui LPSE	100%	230,000,000	
3.4	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam		Persentase rekomendasi hasil monitoring yang ditindaklanjuti	100%	20,000,000	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam		Persentase rekomendasi hasil monitoring yang ditindaklanjuti	100%	10,000,000	
3.4.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah pembinaan, pengawasan dan monitoring usaha di bidang Energi Sumber Daya Mineral	4 Kali	20,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah pembinaan, pengawasan dan monitoring usaha di bidang Energi Sumber Daya Mineral	4 Kali	10,000,000	
4	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM		Nilai AKIP	A	5,088,714,847	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM		Nilai AKIP	A	3,935,437,915	
			IKM	81,35				IKM	81,35		
			Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja Oleh Kemennan RB	12,50				Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja Oleh Kemennan RB	12,50		
			Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100%				Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100%		
			Persentase Perangkat Daerah yang memiliki IKM dengan kategori BAIK pada tahun n	93,55%				Persentase Perangkat Daerah yang memiliki IKM dengan kategori BAIK pada tahun n	93,55%		
			Persentase Unit Pelayanan Publik Dengan Kategori Pelayanan Baik	100%				Persentase Unit Pelayanan Publik Dengan Kategori Pelayanan Baik	100%		
			Persentase sarana dan prasarana kantor serta rumah dinas yang terpelihara dengan baik	85%				Persentase sarana dan prasarana kantor serta rumah dinas yang terpelihara dengan baik	85%		
			Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang sesuai SOP	100%				Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang sesuai SOP	100%		
			Persentase informasi dan dokumentasi yang dihasilkan dalam rangka pelayanan informasi kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	100%				Persentase informasi dan dokumentasi yang dihasilkan dalam rangka pelayanan informasi kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	100%		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1	Pelaksanaan Administrasi Umum		Persentase kelengkapan administrasi kegiatan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah sesuai SDP	100%	1,468,179,815	Pelaksanaan Administrasi Umum		Persentase kelengkapan administrasi kegiatan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah sesuai SDP	100%	1,492,179,815	
			Persentase pelayanan kesehatan yang dilaksanakan	100%				Persentase pelayanan kesehatan yang dilaksanakan	100%		
			Persentase rekomendasi kebijakan yang dihasilkan sesuai lingkup bidang	100%				Persentase rekomendasi kebijakan yang dihasilkan sesuai lingkup bidang	100%		
			Persentase pemeliharaan gedung kantor	100%				Persentase pemeliharaan gedung kantor	100%		
			Persentase pemeliharaan rumah dinas	100%				Persentase pemeliharaan rumah dinas	100%		
4.1.1	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian		Jumlah kelengkapan administrasi kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang siapkan	90 kali	1,420,179,815	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian		Jumlah kelengkapan administrasi kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang siapkan	90 kali	1,420,179,815	
			Jumlah Non PNS yang dijamin pemeliharaan kesehatannya	4 org				Jumlah Non PNS yang dijamin pemeliharaan kesehatannya	4 org		
			Jumlah staf ahli yang difasilitasi kegiatannya	3 orang				Jumlah staf ahli yang difasilitasi kegiatannya	3 orang		
4.1.2	Pengelolaan Perlengkapan		Jumlah pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun	1 gedung	20,000,000	Pengelolaan Perlengkapan		Jumlah pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun	1 gedung	36,000,000	
4.1.3	Pengelolaan Rumah Tangga		Jumlah pemeliharaan rumah dinas/jabatan	3 gedung	28,000,000	Pengelolaan Rumah Tangga		Jumlah pemeliharaan rumah dinas/jabatan	3 gedung	36,000,000	
4.2	Penataan Organisasi		Persentase usulan Perwako Tusi Perangkat Daerah yang difasilitasi	100%	938,644,532	Penataan Organisasi		Persentase usulan Perwako Tusi Perangkat Daerah yang difasilitasi	100%	420,869,000	
			Persentase jabatan pada organisasi Perangkat Daerah yang telah di ANJAB dan ABK	100%				Persentase jabatan pada organisasi Perangkat Daerah yang telah di ANJAB dan ABK	100%		
			Persentase jabatan yang telah ditetapkan kelas jabatannya oleh Kemenpan RR	100%				Persentase jabatan yang telah ditetapkan kelas jabatannya oleh Kemenpan RR	100%		
			Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan dan menyusun SKM sesuai dengan pedoman	100%				Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan dan menyusun SKM sesuai dengan pedoman	100%		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase Perangkat Daerah yang penyelenggaraan pelayanan publiknya dengan kategori BAIK	85%				Persentase Perangkat Daerah yang penyelenggaraan pelayanan publiknya dengan kategori BAIK	85%		
			Persentase PD yang menyusun dokumen ketatalaksanaan sesuai dengan pedoman	64,52%				Persentase PD yang menyusun dokumen ketatalaksanaan sesuai dengan pedoman	64,52%		
			Persentase PD yang menyampaikan dokumen LKilP tepat waktu	100%				Persentase PD yang menyampaikan dokumen LKilP tepat waktu	100%		
			Persentase Perangkat Daerah yang nilai komponen pelaporan kinerja dalam kategori BAIK	100%				Persentase Perangkat Daerah yang nilai komponen pelaporan kinerja dalam kategori BAIK	100%		
4.2.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Ranperda/Perda/Perwako yang disusun	2 Dokumen	139,498,117	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Ranperda/Perda/Perwako yang disusun	2 Dokumen	85,000,000	
			Jumlah dokumen Anjab dan ABK Perangkat Daerah yang disusun	31 OPD				Jumlah dokumen Anjab dan ABK Perangkat Daerah yang disusun	31 OPD		
4.2.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Laporan SKM yang disusun	1 dokumen	533,004,955	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Laporan SKM yang disusun	1 dokumen	195,869,000	
			Jumlah sosialisasi pelayanan publik yang dilaksanakan	1 kali				Jumlah sosialisasi pelayanan publik yang dilaksanakan	1 kali		
			Jumlah laporan kompetisi inovasi publik (KIPP) yang disusun	3 OPD				Jumlah laporan kompetisi inovasi publik (KIPP) yang disusun	3 OPD		
4.2.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi (LKilP)	2 dokumen	266,141,460	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi (LKilP)	2 dokumen	140,000,000	
			Jumlah orang yang mengikuti bintek implementasi AKIP	50 orang				Jumlah orang yang mengikuti bintek implementasi AKIP	50 orang		
4.3	Protokoler dan Komunikasi Pimpinan		Persentase acara kedinasan (seremonial keprotokolan) yang difasilitasi dengan baik	100%	2,681,890,500	Protokoler dan Komunikasi Pimpinan		Persentase acara kedinasan (seremonial keprotokolan) yang difasilitasi dengan baik	100%	2,021,389,100	
			Persentase Rapat Koordinasi yang difasilitasi dengan baik	100%				Persentase Rapat Koordinasi yang difasilitasi dengan baik	100%		
			Persentase Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang didokumentasikan dengan baik	100%				Persentase Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang didokumentasikan dengan baik	100%		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dipublikasikan dengan baik	100%				Persentase Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dipublikasikan dengan baik	100%		
4.3.1	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah jadwal kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang disusun	24 dokumen	400,000,000	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah jadwal kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang disusun	24 dokumen	188,906,100	
			Jumlah Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	18 Kali				Jumlah Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	18 Kali		
4.3.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	90 Kali	1,582,483,000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	90 Kali	1,382,483,000	
4.3.3	Pendokumentasian tugas pimpinan		Jumlah dokumen kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang didokumentasi dan publikasikan	432 dokumen	699,407,500	Pendokumentasian tugas pimpinan		Jumlah dokumen kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang didokumentasi dan publikasikan	432 dokumen	450,000,000	
4.4	Perencanaan dan Keuangan		Persentase perencanaan dan keuangan yang dilaporkan	100%	-	Perencanaan dan Keuangan		Persentase perencanaan dan keuangan yang dilaporkan	100%	1,000,000	
4.4.1	Pengelolaan Keuangan				-	Pengelolaan Keuangan		Jumlah gaji KDH/WKDH yang dibayarkan	12 bulan	1,000,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat Daerah merupakan unsur pendukung kesekretariatan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Masyarakat selaku pengguna layanan yang diselenggarakan pemerintah daerah seyogyanya tidak hanya menjadi objek layanan tetapi juga menjadi aktor, bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan standar pelayanan disetiap unit pelayanan merupakan amanat Undang-undang nomor 25 tahun 2008 tentang Pelayanan Publik.

Sekretariat Daerah telah mendesain beberapa kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, mulai dari penerapan standarisasi pelayanan, pengukuran kinerja pelayanan serta evaluasi kinerja pelayanan publik disetiap perangkat daerah dan unit pelayanan

Terkait dengan program dan kegiatan yang terlampir dalam usulan Musrenbang Kecamatan secara langsung tidak ada yang masuk ke Sekretariat Daerah, namun program dan kegiatan rutin yang bersentuhan langsung kepada masyarakat tetap dianggarkan dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh tahun 2021 sebagaimana terlampir pada Tabel 2.5. Persandingan daftar kegiatan prioritas hasil musrenbang kecamatan tahun 2021 dengan renja perangkat daerah

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan *good governance* dan akuntabilitas publik. Dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh tahun 2021 telah mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan sebagai turunan visi dan misi Sekretariat Daerah yang terkait erat dengan tugas yaitu:

1. Mewujudkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pemerintahan yang akuntabel;
2. Meningkatkan penyekenggaraan pelayanan publik yang berkualitas;
3. Terwujudnya pemberian bantuan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pemerintah daerah berdasarkan kewenangan daerah;
4. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang beragama.

Sehubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan sasaran yang rinci yang harus dipenuhi dalam waktu satu tahun sehingga dapat menjamin keberhasilan rencana jangka menengah dan jangka panjang.

Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah:

1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
4. Mewujudkan kepastian hukum sesuai dengan kewenangan daerah
5. Meningkatnya peran lembaga agama dalam tata kehidupan masyarakat

3.3. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Penerapan regulasi baru dalam sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan yaitu Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Maka untuk tahun anggaran 2021, Rencana kerja Sekretariat Daerah tahun 2021 tertuang dalam Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan :

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
 - b. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah;
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrai Keuangan
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Umum
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat;
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
 - d. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS;
 - e. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah;
 - f. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
 - g. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
 - h. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - i. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
 - j. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - k. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - l. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - m. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - n. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan;
 - o. Penyediaan makanan dan minuman;
 - p. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - q. Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
 - r. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas;
 - s. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
 - t. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

- u. Pengadaan peralatan gedung kantor;
 - v. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan;
 - w. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 - x. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;
 - y. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 - z. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas;
 - aa. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
 - bb. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas;
 - cc. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
 - dd. Rehab sedang/ berat rumah dinas;
 - ee. Rehab sedang/ berat gedung kantor;
4. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

II. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan :

1. Administrasi dan Tata Pemerintahan

- a. Penataan Administrasi Pemerintahan;
- b. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan;
- c. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.

2. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

- a. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual;
- b. Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial;
- c. Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat.

3. Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah

- a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- b. Fasilitasi Bantuan Hukum;
- c. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.

4. Fasilitasi Kerjasama Daerah

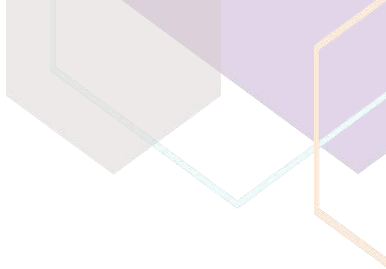
- a. Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri;
- b. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.

III. Program Perekonomian dan Pembangunan

Kegiatan :

1. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

- a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD;

- 
- b. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian.
 - 2. Administrasi Pembangunan
 - a. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.
 - 3. Pengadaan Barang dan Jasa
 - a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
 - 4. Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.

IV. Program Administrasi Umum

Kegiatan :

- 1. Pelaksanaan Administrasi Umum
 - a. Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b. Pengelolaan Perlengkapan;
 - c. Pengelolaan Rumah Tangga.
- 2. Penataan Organisasi
 - a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
 - c. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
- 3. Protokoler dan Komunikasi Pimpinan
 - a. Fasilitasi Keprotokolan;
 - b. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan;
 - c. Pendokumentasian tugas pimpinan
- 4. Perencanaan dan Keuangan
 - a. Pengelolaan Keuangan.

Rencana kerja program, kegiatan dan subkegiatan serta penganggaran, indikator dan target capaian kinerja dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
SUMBER DANA APBD KOTA PAYAKUMBUH

NO	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KESEKRETARIATAN DAERAH				27,603,858,721				28,994,351,657
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai AKIP		A	20,218,046,574			A	21,239,248,903
		Nilai Evaluasi AKIP Setdako oleh Inspektorat IKM		A				A	
				81,35				81,85	
1.1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan penyelesaian dokumen SAKIP Setdako sesuai pedoman		100%	33,000,000	DAU		100%	45,000,000
		Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja yang selaras dengan Renstra		100%				100%	
		IKM Sekretariat Daerah		81,35				81,85	
		Persentase pemenuhan kebutuhan kepada Kepala Daerah		100%				100%	
		Persentase layanan perkantoran yang terfasilitasi dengan baik		100%				100%	
		Persentase sarana dan prasarana kantor serta rumah dinas yang terpelihara dengan baik		85%				85%	
		Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan perundang-undangan yang berlaku		100%				100%	
		Persentase dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu		100%				100%	
		Persentase Ketersediaan dokumen Pelayanan Publik		100%				100%	
1.1.1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun		2 dokumen	10,000,000			2 dokumen	15,000,000
1.1.3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi, pelaporan dan dokumen pelayanan publik yang disusun		7 dokumen	15,000,000			7 dokumen	15,000,000

NO	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah rapat-rapat evaluasi kinerja yang dilaksanakan		4 kali	8,000,000			4 kali	15,000,000
1.2	Administrasi Keuangan	Persentase kesesuaian penatausahaan keuangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku		100%	10,713,007,008			100%	11,248,657,358
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah asn yang dibayarkan gaji dan tunjangannya		85 orang	10,713,007,008			85 orang	11,248,657,358
1.3	Administrasi Umum	Persentase layanan umum yang dilakukan dengan baik		90%	9,316,539,566			90%	9,782,316,544
		Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan		100 unit				100 unit	
		Jumlah aset lingkup Setdako yang tercatat		1502 unit				1502 unit	
		Persentase kendaraan dinas roda dua dan roda empat dalam kondisi baik		90%				90%	
		Persentase pelayanan kedinasan/ tamu kepala daerah yang terlayani dengan baik		85%				85%	
		Persentase pelayanan rumah tangga Kepala Daerah dengan baik		85%				85%	
		Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas		100%				100%	
		Persentase capaian kinerja program/ kegiatan		90%				90%	
1.3.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos yang tersedia dan jumlah surat yang terkirim		3.400 Lembar	19,998,000			3.400 Lembar	20,997,900
1.3.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, air, televisi berlangganan dan listrik yang dibayarkan		4 Rekening	1,109,000,000			4 Rekening	1,164,450,000
1.3.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase lancarnya aktivitas perkantoran		100%	306,132,500			100%	321,439,125
1.3.4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	persentase ASN dan kepala daerah yang dibayarkan jaminan pemeliharaan kesehatan		100%	1,000,000			100%	1,000,000
1.3.5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Pembayaran honor THL pengamanan sarana dan prasarana kantor dan rumah dinas	 orang	89,425,476		 orang	93,896,750

NO	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Indikato Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang pajaknya dibayarkan		85 Unit	601,042,460			85 Unit	631,094,583
1.3.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penyedia administrasi keuangan yang dibayarkan		84 orang	568,000,000			84 orang	596,400,000
1.3.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan yang tersedia		12 bln	1,792,580,000			12 bln	1,882,209,000
1.3.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki		30 unit	19,994,610			30 unit	20,994,341
1.3.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan		45 item	34,354,575			45 item	36,072,304
1.3.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan		13 item	60,721,915			13 item	63,758,011
1.3.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan		1039 unit	43,381,500			1039 unit	45,550,575
1.3.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		3 unit	36,206,300			3 unit	38,016,615
1.3.14	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		2 jenis buku	7,000,000			2 jenis buku	7,350,000
1.3.15	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum yang disediakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas		2500 porsi	1,000,000,000			2500 porsi	1,050,000,000
1.3.16	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah		430 kali	1,170,000,000			430 kali	1,228,500,000
1.3.17	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan		5 Unit	-			5 Unit	0
1.3.18	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang di sediakan		3 unit	250,000,000			3 unit	262,500,000
1.3.19	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedungkantor yang di adakan		1 unit	216,050,000			1 unit	226,852,500
1.3.20	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/ dinas yang di sediakan		5 Unit	282,368,000			5 Unit	296,486,400
1.3.21	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang di sediakan		1 unit	74,100,000			1 unit	77,805,000

NO	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.22	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah Rumah jabatan yang di lakukan pemeliharaan		3 unit	282,492,350			3 unit	296,616,968
1.3.23	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin kantor		1 unit	129,700,000			1 unit	136,185,000
1.3.24	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin Mobil Jabatan		5 Unit	300,000,000			5 Unit	315,000,000
1.3.25	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas / operasional yang di lakukan pemeliharaan		80 unit	691,233,280			80 unit	725,794,944
1.3.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah Perlengkapan rumah jabatan yang di lakukan pemeliharaan rutin		3 Unit	21,848,400			3 Unit	22,940,820
1.3.27	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin.		1 unit gedung	125,500,000			1 unit gedung	131,775,000
1.3.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan / dinas yang dilakukan pemeliharaan rutin		50 unit	42,025,350			50 unit	44,126,618
1.3.29	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan rumah jabatan / dinas yang di lakukan pemeliharaan rutin.		10 unit	40,384,850			10 unit	42,404,093
1.3.30	Rehab sedang/ berat rumah dinas	Jumlah fasilitas rumah dinas yang direhab		3 unit	1,000,000			3 unit	1,050,000
1.3.31	Rehab sedang/ berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di rehab		1 unit	1,000,000			1 unit	1,050,000
1.4	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase layanan umum yang dilakukan dengan baik		90%	155,500,000			90%	163,275,000
1.4.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan		210 Stel	155,500,000			210 Stel	163,275,000
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Peringkat LPPD		13	2,585,374,232	DAU		12	2,714,642,944
		Persentase lembaga keagamaan (MUI) yang aktif		85%				100%	
		Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga/bada zakat/wakaf		4,60%				5%	

NO	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase penyelesaian masalah hukum yang diproses secara non litigasi		85%				90%	
		Nilai LPPD Kota Payakumbuh		3				3	
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang baik		100%				100%	
		Persentase masalah kewilayahan yang ditangani		90%				90%	
		Persentase Organisasi Sosial Yang Aktif		77%				77%	
		Persentase masjid yang dikelola secara optimal		15%				15%	
		Persentase Pegawai Negeri Sipil yang menyalurkan zakat/wakaf melalui lembaga badan zakat/wakaf		80%				80%	
		Persentase MUI Kecamatan dan Lembaga Keagamaan Pendukung MUI yang aktif		80%				80%	
		Jumlah sekolah/ madrasah yang meningkat strata UKS/M pada tahun n		4 sekolah				4 sekolah	
		Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan		100%				100%	
		Persentase kasus bantuan hukum yang tertangani		75%				75%	
		Persentase perda yang dibahas di DPRD setelah diusulkan pemrakarsa		80%				80%	
		Persentase peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan ke masyarakat		100%				100%	
2.1	Administrasi dan Tata Pemerintahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		100%	947,858,982			100%	995,251,931
		Persentase LPM yang berprestasi		100%				100%	
		Persentase penyelenggaraan kelurahan dalam kategori baik		100%				100%	

NO	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Indikato Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase RT/RW yang tertib administrasi		80%				80%	
		Persentase permasalahan tapal batas yang terselesaikan		80%				80%	
		Persentase data rupa bumi yang diinventarisir		50%				50%	
		Persentase Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik		100%				100%	
		Persentase Camat dan Lurah yang berprestasi tingkat Payakumbuh		100%				100%	
		Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan tepat waktu		5 dok				5 dok	
2.1.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Pelaksanaan kegiatan pembinaan lembaga/ organisasi masyarakat		1 kegiatan	398,945,202			1 kegiatan	418,892,462
		Pelaksanaan pembinaan dan lomba LPM berprestasi		1 kegiatan				1 kegiatan	
		Pelaksanaan lomba kelurahan berprestasi		1 kegiatan				1 kegiatan	
		Jumlah dokumen adm RT/RW di Kota Payakumbuh		1 dokumen				1 dokumen	
2.1.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen tapal batas yang diinventarisir		2 dokumen	173,913,780			2 dokumen	182,609,469
		Jumlah dokumen data rupa bumi yang diinventarisir		2 dokumen				2 dokumen	
		Jumlah peserta Pelatihan Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan		52 orang				52 orang	
		Terpilihnya camat dan lurah terbaik di Kota Payakumbuh		2 orang				2 orang	
2.1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan tepat waktu		5 dokumen	375,000,000			5 dokumen	393,750,000
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase peningkatan Kompetensi Guru TPQ/ MDTA		80%	1,145,015,250			80%	1,202,266,013

NO	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Lembaga Didikan Subuh yang difasilitasi dan dibina		6 LDS				6 LDS	
		Jumlah kegiatan pembinaan pendidikan keagamaan yang difasilitasi		2 Kali		DAU		2 Kali	
		Jumlah Masjid yang melaksanakan Magrib Mengaji		48 Masjid				48 Masjid	
		Persentase Masjid yang memiliki imam dan khatib tetap		50%				50%	
		Jumlah Masjid Yang dikunjungi Tim Ramadhan		20 Masjid				20 Masjid	
		Jumlah Kampung al Qur'an yang dibina		1 Kampung Al Quran				1 Kampung Al Quran	
		Persentase terlaksananya cabang perlombaan MTQ Nasional Tk.		100%				1	
		Jumlah MUI Kecamatan dan Lembaga Keagamaan Pendukung MUI yang terfasilitasi		6 lembaga				6 lembaga	
		Persentase proposal bantuan hibah yang diproses		100%				100%	
		Persentase organisasi sosial yang dibina dan difasilitasi		80%				80%	
		Jumlah ASN yang menyalurkan zakat/ wakaf selama tahun n		2.400 ASN				2.400 ASN	
		Jumlah sekolah/ madrasah yang mengikuti lomba UKS Tk. Propinsi pada tahun n		4 Sekolah				4 Sekolah	
2.2.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah pelatihan kompetensi guru TPQ/MDTA yang dilaksanakan		1 kali	400,000,000			1 kali	420,000,000
		Jumlah Lembaga Didikan Subuh yang difasilitasi dan dibina		6 LDS				6 LDS	
		Jumlah koordinasi dan pelaksanaan kebijakan		4 kali				4 kali	
		Jumlah sosialisasi pencaangan maghrib mengaji yang dilaksanakan		1 kali				1 kali	

NO	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah pelaksanaan pelatihan imam dan khatib yang dilaksanakan		1 kali				1 kali	
		Pelaksanaan persiapan kunjungan tim ramadhan yang dilaksanakan		2 kali				2 kali	
		Pelaksanaan pembinaan terhadap kampung Al Quran yang telah ditetapkan		1 kegiatan				1 kegiatan	
		Jumlah Cabang MTQ yang dilombakan		18 cabang				18 cabang	
		Jumlah MUI Kecamatan dan lembaga pendukung MUI yang terfasilitasi kegiatannya		5 MUI Kecamatan				5 MUI Kecamatan	
		Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi hibah bansos		12 kali				12 kali	
2.2.2	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah organisasi sosial yang dilakukan pembinaan			444,481,000				466,705,050
2.2.3	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah rakor UKS TK Kecamatan yang dilaksanakan 2. Jumlah Rakerda UKS TK Kota yang dilaksanakan 3. Jumlah Rakerda UKS TK Propinsi yang diikuti 4. Jumlah sekolah yang dibina untuk lomba sekolah sehat TK. Provinsi 5. Jumlah sekolah yang dibina untuk lomba sekolah sehat tk nasional 6. Jumlah sekolah yang dibina untuk lomba sekolah sehat TK Kota 7. Jumlah peserta yang difasilitasi untuk mengikuti jambore UKS tk propinsi dan nasional		1 kali 1 kali 1 kali 4 sekolah 1 sekolah 16 sekolah 9 orang	300,534,250			1 kali 1 kali 1 kali 4 sekolah 1 sekolah 16 sekolah 9 orang	315,560,963
2.3	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	Persentase rancangan produk hukum daerah yang diharmonisasi		100%	470,000,000			1	493,500,000
		Jumlah ranperda yang diusulkan untuk dibahas pada tahun n		6 buah				6 buah	

NO	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah perda yang dibahas di DPRD		6 buah				6 buah	
		Jumlah produk hukum yang ditetapkan : - Perda - Perwako - SK		6 Perda 50 Perwako 800 SK				6 Perda 50 Perwako 800 SK	
		Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti terkait masalah hukum		3 permasalahan				3 permasalahan	
		Jumlah bantuan hukum yang diberikan untuk masyarakat miskin		4 perkara				4 perkara	
		Jumlah rencana aksi penyelesaian masalah hukum yang ditidakiikuti		2 kegiatan				2 kegiatan	
		Jumlah sosialisasi hukum dan peraturan Perundang- undangan		2 kali				2 kali	
		Jumlah pembuatan lembaran daerah, berita daerah, panduan		100 buku				100 buku	
		Jumlah peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan		56 peraturan				56 peraturan	
2.3.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah rancangan peraturan perundang- undangan		6 Ranperda	70,000,000			6 Ranperda	73,500,000
		Jumlah sosialisasi peraturan perundang- undangan yang dilaksanakan		2 kali		DAU		2 kali	
		Jumlah peraturan perundang-undangan yang diterbitkan		3 kajian				3 kajian	
2.3.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah perkara hukum yang ditangani		3 perkara	330,000,000			3 perkara	346,500,000
		Jumlah perkara masyarakat miskin yang mendapat Bantuan Hukum		4 perkara				4 perkara	
2.3.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dipublikasikan		100 peraturan	70,000,000			100 peraturan	73,500,000
		Jumlah produk hukum yang dikelola dgn baik							

NO	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase MoU yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama		100%	22,500,000			100%	23,625,000
2.4.1	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah MoU/PKS Dalam Negeri yang difasilitasi		5 MoU/PKS	15,000,000			5 MoU/PKS	15,750,000
2.4.3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah dokumen evaluasi kerjasama yang disusun		1 dokumen	7,500,000			1 dokumen	7,875,000
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase jumlah paket lelang yang melalui elektronik		100%	865,000,000			100%	908,250,000
		IKM		81,35				81,35	
		Persentase pengelolaan kegiatan yang tertib administrasi sesuai aturan		100%				100%	
		Persentase tender/Seleksi yang terselesaikan melalui UKPBJ		100%				100%	
		Persentase terlaksananya strategi pengendalian inflasi		100%				100%	
		Persentase terlaksananya penyajian data/ informasi bidang ekonomi		100%				100%	
		Persentase terlaksananya kebijakan ekonomi & SD energi dan mineral		100%				100%	
		Persentase BUMD yang sehat dan menguntungkan		100%				100%	
3.1	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi kebijakan stabilisasi harga pasar		80%	170,000,000			80%	178,500,000
		Jumlah dokumen pembentukan dan pembinaan BUMD		2 dokumen				2 dokumen	
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindak lanjuti		80%				80%	
		Persentase lembaga yang memanfaatkan data perkembangan produksi daerah		80%				80%	
3.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah pembinaan, pengawasan dan monitoring BUMD dan BLUD		4 Kali	80,000,000			4 Kali	84,000,000

NO	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi, pengendalian inflasi		12 Kali	90,000,000	DAU		12 Kali	94,500,000
		Jumlah Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah		5 kali				5 kali	
		Jumlah Buku Produksi Daerah Bidang Ekonomi Yang Disusun		4 Dokumen				4 Dokumen	
3.2	Administrasi Pembangunan	Persentase pencapaian realisasi fisik kegiatan pembangunan		100%	35,000,000			100%	36,750,000
3.2.1	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang disusun		12 dokumen	35,000,000			12 dokumen	36,750,000
3.3	Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui ULP		100%	650,000,000			100%	682,500,000
		Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui LPSE		100%				100%	
3.3.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh sesuai Peraturan Perundang-undangan		100%	420,000,000			100%	441,000,000
3.3.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	persentase paket pengadaan barang/jasa yang metode pelaksanaannya wajib dilakukan melalui LPSE		100%	230,000,000			100%	241,500,000
3.4	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi hasil monitoring yang ditindaklanjuti		100%	10,000,000			100%	10,500,000
3.4.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah pembinaan, pengawasan dan monitoring usaha di bidang		4 Kali	10,000,000			4 Kali	10,500,000
4	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Nilai AKIP		A	3,935,437,915			A	4,132,209,811
		IKM		81,35				81,35	
		Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja Oleh		12,50				12,50	

NO	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan		100%				100%	
		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki IKM dengan kategori BAIK pada tahun n		93,55%				93,55%	
		Persentase Unit Pelayanan Publik Dengan Kategori Pelayanan Baik		100%				100%	
		Persentase sarana dan prasarana kantor serta rumah dinas yang terpelihara dengan baik		85%				85%	
		Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang sesuai SOP		100%				100%	
		Persentase informasi dan dokumentasi yang dihasilkan dalam rangka pelayanan informasi kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah		100%				100%	
4.1	Pelaksanaan Administrasi Umum	Persentase kelengkapan administrasi kegiatan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah sesuai SOP		100%	1,492,179,815			100%	1,566,788,806
		Persentase pelayanan kesehatan yang dilaksanakan		100%				100%	
		Persentase rekomendasi kebijakan yang dihasilkan sesuai lingkup bidang		100%				100%	
		Persentase pemeliharaan gedung kantor		100%				100%	
		Persentase pemeliharaan rumah dinas		100%				100%	
4.1.1	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Jumlah kelengkapan administrasi kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang siapkan		90 kali	1,420,179,815			90 kali	1,491,188,806
		Jumlah Non PNS yang dijamin pemeliharaan kesehatannya		4 org				4 org	

NO	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah staf ahli yang difasilitasi kegiatannya		3 orang				3 orang	
4.1.2	Pengelolaan Perlengkapan	Jumlah pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun		1 gedung	36,000,000			1 gedung	37,800,000
4.1.3	Pengelolaan Rumah Tangga	Jumlah pemeliharaan rumah dinas/iabatan		3 gedung	36,000,000			3 gedung	37,800,000
4.2	Penataan Organisasi	Persentase usulan Perwako Tusi Perangkat Daerah yang difasilitasi		100%	420,869,000			100.00%	441,912,450
		Persentase jabatan pada organisasi Perangkat Daerah yang telah di ANJAB dan ABK		100%				100%	
		Persentase jabatan yang telah ditetapkan kelas jabatannya oleh Kemendagri RB		100%				100%	
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan dan menyusun SKM sesuai dengan pedoman		100%				100%	
		Persentase Perangkat Daerah yang penyelenggaraan pelayanan publiknya dengan kategori BAIK		85%				85%	
		Persentase PD yang menyusun dokumen ketatalaksanaan sesuai dengan pedoman		64,52%				64,52%	
		Persentase PD yang menyampaikan dokumen LKJIP tepat waktu		100%				100%	
		Persentase Perangkat Daerah yang nilai komponen pelaporan kinerja dalam kategori BAIK		100%				100%	
4.2.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Ranperda/Perda/Perwako yang disusun		2 Dokumen	85,000,000			2 Dokumen	89,250,000
		Jumlah dokumen Anjab dan ABK Perangkat Daerah yang disusun		31 OPD				31 OPD	
4.2.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan SKM yang disusun		1 dokumen	195,869,000			1 dokumen	205,662,450
		Jumlah sosialisasi pelayanan publik yang dilaksanakan		1 kali				1 kali	

NO	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Indikato Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah laporan kompetisi inovasi publik (KIPP) yang disusun		3 OPD				3 OPD	
4.2.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi (LKilP)		2 dokumen	140,000,000			2 dokumen	147,000,000
		Jumlah orang yang mengikuti bintek implementasi AKIP		50 orang				50 orang	
4.3	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase acara kedinasan (seremonial keprotokolan) yang difasilitasi dengan baik		100%	2,021,389,100			100%	2,122,458,555
		Persentase Rapat Koordinasi yang difasilitasi dengan baik		100%				100%	
		Persentase Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang didokumentasikan dengan baik		100%				100%	
		Persentase Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dipublikasikan dengan baik		100%				100%	
4.3.1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah jadwal kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang disusun		24 dokumen	188,906,100			24 dokumen	198,351,405
		Jumlah Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah yang dilaksanakan		18 Kali				18 Kali	
4.3.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya		90 Kali	1,382,483,000			90 Kali	1,451,607,150
4.3.3	Pendokumentasian tugas pimpinan	Jumlah dokumen kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang didokumentasi dan publikasikan		432 dokumen	450,000,000			432 dokumen	472,500,000
4.4	Perencanaan dan Keuangan	Persentase perencanaan dan keuangan yang dilaporkan		100%	1,000,000			100%	1,050,000
4.4.1	Pengelolaan Keuangan	Jumlah gaji KDH/WKDH yang dibayarkan		12 bulan	1,000,000			12 bulan	1,050,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh tahun 2021 terdiri dari beberapa Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis Sekretariat Daerah tahun 2021. Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2021 diuraikan dalam tabel 4.1.a dan tabel 4.1.b sebagai berikut :

TABEL 4.1.a
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

Sesuai Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2017 - 2022

Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
	Sekretariat Daerah								27,603,858,721	28,994,351,657	
	Belanja Tidak Langsung								10,713,007,008	11,248,657,358	
	Belanja Gaji dan Tunjangan				Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tuniangannya	84 org			10,713,007,008	11,248,657,358	
	Belanja Langsung								16,890,851,713	17,745,694,299	
03	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A		Nilai IKM Setdako	86	7,777,000,151	8,165,850,156
03	01	01	01				Jumlah benda pos yang tersedia dan jumlah surat yang terkirim	3.400 Lembar		19,998,000	20,997,900
03	01	01	02				Jumlah rekening telepon, air, televisi berlangganan dan listrik yang dibayarkan	4 Rekening		1,109,000,000	1,164,450,000
03	01	01	03				Persentase lancarnya aktivitas perkantoran	100%		306,132,500	321,439,125
03	01	01	06				Jumlah kendaraan dinas operasional yang pajaknya dibayarkan	85 Unit		601,042,460	631,094,583
03	01	01	07				Jumlah penyedia administrasi keuangan yang dibayarkan	84 orang		568,000,000	596,400,000
03	01	01	08				Jumlah jasa kebersihan yang tersedia	12 bln		1,792,580,000	1,882,209,000
03	01	01	09				Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	30 unit		19,994,610	20,994,340
03	01	01	10				Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	45 item		34,354,575	36,072,303
03	01	01	11				Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	13 item		60,721,915	63,758,010
03	01	01	12				Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	1039 unit		43,381,500	45,550,575
03	01	01	13				Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	3 unit		36,206,300	38,016,615
03	01	01	15				Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 jenis buku		7,000,000	7,350,000
03	01	01	17				Jumlah makan dan minum yang disediakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas	2500 porsi		1,000,000,000	1,050,000,000

Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
03 01 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	430 kali			1,170,000,000	1,228,500,000	
03 01 01 19	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran				Jumlah tenaga harian lepas yang di pekerjakan	55 Orang			993,588,291	1,043,267,705	
03 01 01 21	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non-PNS				Jumlah Non PNS yang dijamin pemeliharaannya	4 Orang			15,000,000	15,750,000	
03 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A				Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80%	2,457,702,230	2,580,587,340
03 01 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				Jumlah perlengkapan gedungkantor yang di adakan	1 unit			216,050,000	226,852,500	
03 01 02 08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas				Jumlah peralatan rumah jabatan/ dinas yang di sediakan	5 Unit			282,368,000	296,486,400	
03 01 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				Jumlah peralatan gedung kantor yang di sediakan	1 unit			74,100,000	77,805,000	
03 01 02 11	Pengadaan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan				Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana rumah jabatan yang di adakan	3 unit Gedung			250,000,000	262,500,000	
03 01 02 20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan				Jumlah Rumah jabatan yang di lakukan pemeliharaan	3 Unit Gedung			282,492,350	296,616,967	
03 01 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				Jumlah pemeliharaan rutin kantor	1 gedung			129,700,000	136,185,000	
03 01 02 23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan				Jumlah pemeliharaan rutin Mobil Jabatan	5 Unit			300,000,000	315,000,000	
03 01 02 24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional				jumlah kendaraan dinas / operasional yang di lakukan pemeliharaan	80 unit			691,233,280	725,794,944	
03 01 02 25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas				Jumlah Perlengkapan rumah jabatan yang di lakukan pemeliharaan rutin	3 Unit			21,848,400	22,940,820	
03 01 02 26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor				Jumlah perlengkapan gedunbg kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin.	1 Gedung			125,500,000	131,775,000	
03 01 02 27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas				Jumlah peralatan rumah jabatan / dinas yang dilakukan pemeliharaan rutin	50 unit			42,025,350	44,126,617	
03 01 02 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor				Jumlah peralatan rumah jabatan/ dinas yang di lakukan pemeliharaan rutin.	10 unit			40,384,850	42,404,092	

Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)					
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
03	01	02					Rumah jabatan yang lakukan rehabilitasi	3 gedung			1,000,000	1,050,000
03	01	02					Gedung kantor yang dilakukan rehabilitasi	1 gedung			1,000,000	1,050,000
03	01	03					Program Peningkatan Disiplin Aparatur				155,500,000	163,275,000
			4	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A					Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100%	
03	01	03	02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	210 Stel		155,500,000	163,275,000
03	01	06					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan				388,869,000	407,612,455
			4	Nilai Evaluasi AKIP dan IKM Kota Pavakumbuh	A ; 81,35					Nilai Evaluasi AKIP dan IKM Kota Pavakumbuh	A ; 81,35	
03	01	06	01				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah (SKPD)	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja yang disusun	5 dokumen		15,000,000	15,000,000
03	01	06	07				Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik	jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	4 dokumen		10,000,000	10,500,000
03	01	06	08				Penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun	1 Dokumen		10,000,000	10,500,000
03	01	06	10				Penyusunan laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah Laporan SKM yang disusun	1 dokumen		150,000,000	157,500,000
03	01	06	12				Penyusunan perjanjian Kinerja dan pelaporan kinerja SKPD	Jumlah dokumen perjanjian kinerja dan dokumen pelaporan yang disusun	2 dokumen		8,000,000	8,400,000
03	01	06	13				Monitoring Evaluasi dan Pelaporan bantuan hibah	Persentase proposal bahan hibah yang dievaluasi	100%		10,000,000	10,500,000
03	01	06					Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah perangkat daerah yang menyusun dokumen inovasi	31 PD		15,000,000	15,750,000
03	01	06	16				Peningkatan Kapasitas Ketatalaksanaan	Persentase perangkat daerah yang pelayanan publiknya dalam kategori baik (SOP, SP, PUPP, KIPP, dan FKP)	48.39%		10,869,000	11,462,455
03	01	06	19				Penyusunan perjanjian kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi (LKIP)	2 dokumen		120,000,000	126,000,000
03	01	06					Forum Konsultasi Publik	Jumlah FKP yang dilaksanakan	1 kali		20,000,000	21,000,000
03	01	06	23				Bimtek Implementasi AKIP	Persentase Perangkat Daerah yang nilai komponen pelaporan dalam kondisi baik	100%		20,000,000	21,000,000

Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022			
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)						
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target					
03	01	16		Program Peningkatan pelayanan kedinasan KDH/ Wakil KDH	4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.35			Persentase peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH	100%	2,588,906,100	2,718,351,405
03	01	16	04	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah				Jumlah Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	14 Kali			1,000,000,000	1,050,000,000
03	01	16	05	Kunjungan kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil KDH				Jumlah Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	90 kali			900,000,000	945,000,000
03	01	16	06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya				Jumlah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	90 Kali			500,000,000	525,000,000
03	01	16	07	Penyebarluasan informasi kegiatan KDH/ Wakil KDH				Persentase Penyebarluasan Informasi kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	90%			100,906,100	105,951,405
03	01	16	08	Peningkatan pelayanan keprotokolan				Persentase Pelayanan Keprotokolan	85%			88,000,000	92,400,000
03	01	25		Program Penataan peraturan perundang-undangan	4	Persentase penyelesaian masalah hukum yang diproses secara non litigasi	85%			Persentase penyelesaian masalah hukum yang diproses secara non litigasi	85%	470,000,000	493,500,000
03	01	25	01	Koordinasi kerjasama permasalahan perundang-undangan				Jumlah perkara hukum yang ditangani	3 perkara			280,000,000	294,000,000
03	01	25	03	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan				Jumlah rancangan peraturan perundang- undangan	6 Ranperda			35,000,000	36,750,000
03	01	25	04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan				Jumlah sosialisasi peraturan perundang- undangan yang dilaksanakan	2 kali			35,000,000	36,750,000
03	01	25	05	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan				Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dipublikasikan	150 buku			35,000,000	36,750,000
03	01	25	06	Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Baru, Lebih Tinggi Dari Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah				Jumlah peraturan perundang-undangan yang diterbitkan	3 kajian			35,000,000	36,750,000
03	01	25	07	Bantuan hukum bagi masyarakat miskin				Jumlah perkara masyarakat miskin yang mendapat Bantuan Hukum	4 perkara			50,000,000	52,500,000

Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)			
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target		
03 01 28	Program Penyelenggaraan pemerintahan umum dan perangkat daerah	4	Peringkat LPPD	13			Peringkat LPPD	13	922,858,982	969,001,931
03 01 28 01	Penyelenggaraan lomba kompetensi Lurah				Jumlah Lurah Terbaik	1 orang			50,000,000	52,500,000
03 01 28 02	Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Kelurahan				Jumlah peserta Pelatihan Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Kelurahan	52 orang			30,000,000	31,500,000
03 01 28 03	Penyelenggaraan lomba kompetensi camat				Jumlah Camat Terbaik	1 orang			50,000,000	52,500,000
03 01 28 05	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)				Jumlah Dokumen LKPJ Kota Payakumbuh tahun n-1 yang disusun	1 dokumen			165,000,000	173,250,000
03 01 28 09	Koordinasi Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (il PPD)				Jumlah dokumen ILPPD Kota Payakumbuh tahun n-1 yang disusun	1 dokumen			20,000,000	21,000,000
03 01 28 10	Data rupa bumi Kota Payakumbuh				Jumlah dokumen updating data rupa bumi yang disusun	1 paket			10,000,000	10,500,000
03 01 28	Koordinasi Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat				Jumlah kecamatan, kelurahan, dan LPM yang dibina dan mengikuti lomba kelurahan berprestasi, lomba LPM, dan perencanaan BBGRM	5 kec, 47 kelurahan, 10 ketua LPM			218,945,202	229,892,462
03 01 28 68	Fasilitasi Batas daerah				Jumlah Pilar/patok batas wilayah yang dipasang	40 Patok			15,000,000	15,750,000
03 01 28 69	Koordinasi Penyusunan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dan koordinasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan (LPPD)				Jumlah Dokumen EKPPD dan LPPD yang dikoordinasikan Tahun n-1	1 Dokumen			165,000,000	173,250,000
03 01 28	Rapat Koordinasi pemerintahan umum				Jumlah rapat koordinasi bidang pemerintahan yang dilaksanakan	12 kali			18,913,780	19,859,469
03 01 28 72	Penyelenggaraan administrasi RT/RW				Jumlah Kel RT/RW dan LPM yang disediakan Buku Administrasi RT/RW dan LPM	47 Kelurahan, 561 RT/RW dan 47 LPM			45,000,000	47,250,000
03 01 28	Penyediaan buku administrasi pemerintahan kecamatan				Jumlah buku administrasi pemerintahan kecamatan yang diadakan	5 buku			15,000,000	15,750,000
03 01 28	Penyediaan buku administrasi pemerintahan kelurahan				Jumlah buku administrasi pemerintahan kecamatan/ kelurahan yang diadakan	52 buku			35,000,000	36,750,000
03 01 28 74	Koordinasi Penyusunan Profil Kelurahan				Jumlah Profil Kelurahan yang disusun	47 Kelurahan			25,000,000	26,250,000

Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022			
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)						
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target					
03	01	28	75	Pelaksanaan Kegiatan BBGRM			Jumlah Kelurahan/kecamatan untuk Pencanangan dan Kegiatan BBGRM	5 Kecamatan			60,000,000	63,000,000	
03	01	32		Program Peningkatan kapasitas kelembagaan	4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.35			Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ekonomi Yang Ditindak Lanjuti	100%	80,000,000	84,000,000
03	01	32	05	Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang ekonomi			Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi	12 Kali			20,000,000	21,000,000	
03	01	32	06	Pembinaan dan monitoring usaha pertambangan dan energi			Jumlah pembinaan, pengawasan dan monitoring usaha di bidang Energi Sumber Daya Mineral	4 Kali			10,000,000	10,500,000	
03	01	32	07	Koordinasi dan pengendalian inflasi daerah			Jumlah Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	4 Kali			30,000,000	31,500,000	
03	01	32	08	Fasilitasi dan koordinasi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED)			Jumlah rapat FGD FPED yang diadakan	3 kali			20,000,000	21,000,000	
03	01	47		Program penataan kelembagaan dan organisasi daerah	4	Nilai Evaluasi AKIP	A			Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	85,000,000	89,250,000
03	01	47	03	Penataan Organisasi perangkat daerah , penyusunan tugas pokok fungsi dan uraian tugas			Jumlah Ranperda/ Perda/ Perwako yang disusun	2 Dokumen			50,000,000	52,500,000	
03	01	47	04	Penyusunan analisa jabatan ,analisa beban kerja dan evaluasi jabatan			Jumlah dokumen Anjab dan ABK Perangkat Daerah yang disusun	31 OPD			35,000,000	36,750,000	
03	01	48		Program Peningkatan, Pengendalian administrasi pembangunan	4	Persentase jumlah paket lelang melalui elektronik	100%			Persentase pengelola kegiatan yang tertib Administrasi sesuai aturan	94.50%	35,000,000	36,750,000
03	01	48	01	Monitoring, evaluasi, pengendalian administrasi pembangunan(DAU dan Non DAU)			Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan serta pengawasan realisasi anggaran daerah terhadap seluruh Perangkat Daerah	12 Kali			35,000,000	36,750,000	

Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022			
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)						
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target					
03	01	49		Program Pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi	4	Persentase jumlah paket lelang yang melalui elektronik	100%			Persentase tertib administrasi terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah	100%	650,000,000	682,500,000
03	01	49	02	Operasional penyelenggaraan LPSE					persentase paket pengadaan barang/jasa yang metode pelaksanaannya wajib dilakukan melalui LPSE	100%		230,000,000	241,500,000
03	01	49	03	Operasional penyelenggaraan ULP					Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh sesuai Peraturan Perundang-undangan	90%		420,000,000	441,000,000
03	01	51		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	5	Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga/badan zakat/wakaf	4.20%			1. Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui kelembagaan/ Badan Zakat/ Wakaf 2. Persentase masjid yang dikelola secara optimal	1. 4,20 % 2. 65,00 %	540,000,000	578,000,000
03	01	51	01	Pelayanan Ibadah Haji					Jumlah Jama'ah Haji yang difasilitasi	300 Orang		200,000,000	210,000,000
03	01	51	02	Operasional Tim Ramadhan					Jumlah Masjid yang dikunjungi Tim Ramadhan	20 Masjid		45,000,000	47,250,000
03	01	51	03	Operasional Wirid Pengajian					Jumlah Pelaksanaan Wirid Pengajian	45 kali		40,000,000	42,000,000
03	01	51	04	Peringatan Hari Besar Islam					Jumlah Peringatan Hari Besar Islam yang dilaksanakan	6 kali		150,000,000	157,500,000

Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)			
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target		
03 01 51 07	Fasilitasi Kegiatan Kampung Al-Qur'an				- Jumlah tempat ibadah yang melakukan magrib mengaji - Jumlah tempat ibadah yang melaksanakan shalat 5 waktu - Persentase KK yang melaksanakan magrib mengaji - Persentase KK yang mematikan TV waktu magrib mengaji - Jumlah warung yang tutup waktu magrib mengaji	8 tempat ibadah 15 tempat ibadah 40 % 80 % 60 %			30,000,000	42,500,000
03 01 51 08	Fasilitasi Gerakan Subuh Berjama'ah dan Magrib mengaji				- Jumlah Tempat Ibadah yang melaksanakan magrib mengaji	48 Masjid			35,000,000	36,750,000
03 01 51 09	Peningkatan Kompetensi imam mesjid, khatib dan pengurus mesjid				Jumlah peserta yang dilatih sebagai Imam dan Khatib	40 orang			40,000,000	42,000,000
03 01 52	Program Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Sosial Keagamaan	5	Persentase lembaga keagamaan (MUI) yang aktif	60%			Persentase organisasi/lembaga sosial dan keagamaan yang	77%	470,534,250	494,060,962
03 01 52 01	Fasilitasi kegiatan didikan subuh				Jumlah Didikan Subuh yang difasilitasi	6 LDS			35,000,000	36,750,000
03 01 52 02	Fasilitasi kegiatan keagamaan dan budaya				Jumlah Kegiatan Keagamaan dan Budaya yang difasilitasi	30 Lembaga			265,534,250	278,810,962
03 01 52 03	koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan keagamaan				Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Bidang Pendidikan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga	4 kali			15,000,000	15,750,000
03 01 52 05	Fasilitasi MTQ Nasional				Jumlah Cabang MTQ yang dilombakan	18 cabang			100,000,000	105,000,000
03 01 52 08	Koordinasi dan fasilitasi Pelaksanaan kegiatan dan Kebijakan Pembangunan Bidang Kesra				Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat	2 kali			30,000,000	31,500,000
03 01 52 09	Sertifikasi Guru TPQ/MDTA				1. Jumlah Guru TPQ/MDTA yang dilatih 2. Jumlah Guru TPQ/MDTA yang sudah disertifikasi	150 orang 140 orang			25,000,000	26,250,000
03 01 53	Program Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah	4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.35			Jumlah Sekolah Madrasah yang mencapai strata yang maksimal	100%	134,481,000	141,205,050

Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)			
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target		
03 01 53 01	Fasilitasi pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)				1. Jumlah rakor UKS TK Kecamatan yang dilaksanakan 2. Jumlah Rakerda UKS TK Kota yang dilaksanakan 3. Jumlah Rakerda UKS TK Propinsi yang diikuti 4. Jumlah sekolah yang dibina untuk lomba sekolah sehat TK. Provinsi 5. Jumlah sekolah yang dibina untuk lomba sekolah sehat tk nasional 6. Jumlah sekolah yang dibina untuk lomba sekolah sehat TK Kota 7. Jumlah peserta yang difasilitasi untuk mengikuti jambore UKS tk propinsi dan nasional	1 kali 1 kali 4 sekolah 1 sekolah 16 sekolah 9 orang			134,481,000	141,205,050
03 01 55	Program Peningkatan produksi daerah	4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.35			Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Perkembangan Produksi Daerah	100%	120,000,000	126,000,000
03 01 55 01	Koordinasi dan fasilitasi pembentukan BUMD				Jumlah Rapat Koordinasi Pembentukan dan Pembinaan BUMD	4 Kali			80,000,000	84,000,000
03 01 55 03	Pengumpulan, updating dan analisis data informasi perkembangan produksi daerah				Jumlah Buku Produksi Daerah Bidang Ekonomi Yang Disusun	4 Dokumen			40,000,000	42,000,000
03 01 93	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.35			Presentase peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%	15,000,000	15,750,000
03 01 93 03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH				Jumlah staf ahli yang difasilitasi kegiatannya	3 org			15,000,000	15,750,000

TABEL 4.1.b
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

KODE	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan
				Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
				Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KESEKRETARIATAN DAERAH									27,603,858,721	28,994,351,657	
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			Nilai AKIP	A			Persentase ketepatan penyelesaian dokumen SAKIP Setdako sesuai pedoman	100%	20,218,046,574	21,239,248,903	
				Nilai Evaluasi AKIP Setdako oleh Inspektorat	A			Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja yang selaras dengan Renstra	100%			
				IKM	81,35			IKM Sekretariat Daerah	81,35			
								Persentase pemenuhan kebutuhan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%			
								Persentase layanan perkantoran yang terfasilitasi dengan baik	100%			
								Persentase sarana dan prasarana kantor serta rumah dinas yang terpelihara dengan baik	85%			
4	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan perundang-undangan yang berlaku	100%	33,000,000	45,000,000	
								Persentase dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu	100%			
								Persentase Ketersediaan dokumen Pelayanan Publik	100%			
4	01 01 2.01 01			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	2 dokumen		10,000,000	15,000,000	Bag. PA
4	01 01 2.01 03			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			Jumlah dokumen evaluasi, pelaporan dan dokumen pelayanan publik yang disusun	7 dokumen		15,000,000	15,000,000	
4	01 01 2.01 04			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah rapat-rapat evaluasi kinerja yang dilaksanakan	4 kali		8,000,000	15,000,000	

KODE	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan			
				Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)							
				Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan						Persentase kesesuaian penatausahaan keuangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	10,713,007,008	11,248,657,358	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			jumlah asn yang dibayarkan gaji dan tunjangan	85 orang				10,713,007,008	11,248,657,358	
4	01	01	2.03		Administrasi Umum						Persentase layanan umum yang dilakukan dengan baik	90%	9,316,539,566	9,782,316,544	
											Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	100 unit			
											Jumlah asset lingkup Setdako yang tercatat	1502 unit			
											Persentase kendaraan dinas roda dua dan roda empat dalam kondisi baik	90%			
											Persentase pelayanan kedinasan/ tamu kepala daerah yang terlayani dengan baik	85%			
											Persentase pelayanan rumah tangga Kepala Daerah dengan baik	85%			
											Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas	100%			
											Persentase capaian kinerja program/ kegiatan	90%			
4	01	01	2.03	01	Penyediaan jasa surat menyurat			Jumlah benda pos yang tersedia dan jumlah surat yang terkirim	3.400 Lembar				19,998,000	20,997,900	Bag. Umum
4	01	01	2.03	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Jumlah rekening telepon, air, televisi berlangganan dan listrik yang dibayarkan	4 Rekening				1,109,000,000	1,164,450,000	Bag. Umum
4	01	01	2.03	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			Persentase lancarnya aktivitas perkantoran	100%				306,132,500	321,439,125	Bag. Umum
4	01	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS			persentase ASN dan kepala daerah yang dibayarkan jaminan pemeliharaan kesehatan	100%				1,000,000	1,000,000	

KODE	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan
				Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
				Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	01 01 2.03 05					Pembayaran honor THL pengamanan sarana dan prasarana kantor dan rumah dinas	2 orang			89,425,476	93,896,750	Bag. Umum
4	01 01 2.03 06					Jumlah kendaraan dinas operasional yang pajaknya dibayarkan	85 Unit			601,042,460	631,094,583	Bag. Umum
4	01 01 2.03 07					Jumlah penyedia administrasi keuangan yang dibayarkan	84 orang			568,000,000	596,400,000	Bag. PA
4	01 01 2.03 08					Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia	12 bln			1,792,580,000	1,882,209,000	Bag. Umum ' + THL Pramubakti
4	01 01 2.03 09					Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	30 unit			19,994,610	20,994,341	Bag. Umum
4	01 01 2.03 10					Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	45 item			34,354,575	36,072,304	Bag. Umum
4	01 01 2.03 11					Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	13 item			60,721,915	63,758,011	Bag. Umum
4	01 01 2.03 12					Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1039 unit			43,381,500	45,550,575	Bag. Umum
4	01 01 2.03 13					Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	3 unit			36,206,300	38,016,615	Bag. Umum
4	01 01 2.03 15					Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 jenis buku			7,000,000	7,350,000	Bag. Umum
4	01 01 2.03 17					Jumlah makan dan minum yang disediakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas	2500 porsi			1,000,000,000	1,050,000,000	Bag. Umum
4	01 01 2.03 18					Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	430 kali			1,170,000,000	1,228,500,000	Bag. Umum
4	01 01 2.03 20					Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	5 Unit			-	0	Bag. Umum
4	01 01 2.03 21					Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang di sediakan	3 unit			250,000,000	262,500,000	Bag. Umum
4	01 01 2.03 22					Jumlah perlengkapan gedungkantor yang di adakan	1 unit			216,050,000	226,852,500	Bag. Umum

KODE	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan				
				Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)								
				Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
4	01	01	2.03	23	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas			Jumlah peralatan rumah jabatan/ dinas yang di sediakan	5 Unit			282,368,000	296,486,400	Bag. Umum		
4	01	01	2.03	24	Pengadaan peralatan gedung kantor			Jumlah peralatan gedung kantor yang di sediakan	1 unit			74,100,000	77,805,000	Bag. Umum		
4	01	01	2.03	26	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan			Jumlah Rumah jabatan yang di lakukan pemeliharaan	3 unit			282,492,350	296,616,968	Bag. Umum		
4	01	01	2.03	28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Jumlah pemeliharaan rutin kantor	1 unit			129,700,000	136,185,000	Bag. Umum		
4	01	01	2.03	29	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan			Jumlah pemeliharaan rutin Mobil Jabatan	5 Unit			300,000,000	315,000,000	Bag. Umum		
4	01	01	2.03	30	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			jumlah kendaraan dinas / operasional yang di lakukan pemeliharaan	80 unit			691,233,280	725,794,944	Bag. Umum		
4	01	01	2.03	31	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas			Jumlah Perlengkapan rumah jabatan yang di lakukan pemeliharaan rutin	3 Unit			21,848,400	22,940,820	Bag. Umum		
4	01	01	2.03	32	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Jumlah perlengkapan gedunbg kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin.	1 unit gedung			125,500,000	131,775,000	Bag. Umum		
4	01	01	2.03	33	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas			Jumlah peralatan rumah jabatan / dinas yang dilakukan pemeliharaan rutin	50 unit			42,025,350	44,126,618	Bag. Umum		
4	01	01	2.03	34	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Jumlah peralatan rumah jabatan / dinas yang di lakukan pemeliharaan rutin.	10 unit			40,384,850	42,404,093	Bag. Umum		
4	01	01	2.03	37	Rehab sedang/ berat rumah dinas			Jumlah fasilitas rumah dinas yang direhab	3 unit			1,000,000	1,050,000			
4	01	01	2.03	38	Rehab sedang/ berat gedung kantor			Jumlah gedung kantor yang di rehab	1 unit			1,000,000	1,050,000			
4	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					Persentase layanan umum yang dilakukan dengan baik	90%	155,500,000	163,275,000			
4	01	01	2.04	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Jumlah pakaian dinas yang disediakan	210 Stel			155,500,000	163,275,000	Bag. Umum		
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			Peringkat LPPD	13			Nilai LPPD Kota Payakumbuh	3.00	2,585,374,232	2,714,642,944	
								Persentase lembaga keagamaan (MUI) yang aktif	85%			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang baik	100%			

KODE	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan
				Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
				Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga/bada zakat/waqaf	4,60%			Persentase masalah kewilayahan yang ditangani	90%			
				Persentase penyelesaian masalah hukum yang diproses secara non litigasi	85%			Persentase Organisasi Sosial Yang Aktif	77%			
								Persentase masjid yang dikelola secara optimal	15%			
								Persentase Pegawai Negeri Sipil yang menyalurkan zakat/wakaf melalui lembaga badan zakat/wakaf	80%			
								Persentase MUI Kecamatan dan Lembaga Keagamaan Pendukung MUI yang aktif	80%			
								Jumlah sekolah/ madrasah yang meningkat strata UKS/M pada tahun n	4 sekolah			
								Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%			
								Persentase kasus bantuan hukum yang tertangani	75%			
								Persentase perda yang dibahas di DPRD setelah diusulkan pemrakarsa	80%			
								Persentase peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan ke masyarakat	100%			
4	01	02	2.01	Administrasi dan Tata Pemerintahan				Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%	947,858,982	995,251,931	Bag. Pemerintahan
								Persentase LPM yang berprestasi	100%			
								Persentase penyelenggaraan kelurahan dalam kategori baik	100%			

KODE	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan		
				Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)						
				Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
									Persentase RT/RW yang tertib administrasi	80%				
									Persentase permasalahan tapal batas yang terselesaikan	80%				
									Persentase data rupa bumi yang diinventarisir	50%				
									Persentase Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik	100%				
									Persentase Camat dan Lurah yang berprestasi tingkat Payakumbuh	100%				
									Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan tepat waktu	5 dok				
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan				Pelaksanaan kegiatan pembinaan lembaga/ organisasi masyarakat	1 kegiatan		398,945,202	418,892,462	Bag. Pemerintahan
									Pelaksanaan pembinaan dan lomba LPM berprestasi	1 kegiatan				
									Pelaksanaan lomba kelurahan berprestasi	1 kegiatan				
									Jumlah dokumen adm RT/RW di Kota Payakumbuh	1 dokumen				
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				Jumlah dokumen tapal batas yang diinventarisir	2 dokumen		173,913,780	182,609,469	Bag. Pemerintahan
									Jumlah dokumen data rupa bumi yang diinventarisir	2 dokumen				
									Jumlah peserta Pelatihan Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	52 orang				
									Terpilihnya camat dan lurah terbaik di Kota Payakumbuh	2 orang				
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan tepat waktu	5 dokumen		375,000,000	393,750,000	Bag. Pemerintahan

KODE	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan
				Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
				Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Jumlah Lembaga Didikan Subuh yang difasilitasi dan dibina	6 LDS					
						Jumlah koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang pendidikan, keagamaan	4 kali					
						Jumlah sosialisasi pencanangan maghrib mengaji yang dilaksanakan	1 kali					
						Jumlah pelaksanaan pelatihan imam dan khatib yang dilaksanakan	1 kali					
						Pelaksanaan persiapan kunjungan tim ramadhan yang dilaksanakan	2 kali					
						Pelaksanaan pembinaan terhadap kampung Al Quran yang telah ditetapkan	1 kegiatan					
						Jumlah Cabang MTQ yang dilombakan	18 cabang					
						Jumlah MUI Kecamatan dan lembaga pendukung MUI yang terfasilitasi kegiatannya	5 MUI Kecamatan					
						Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi hibah bansos	12 kali					
4	01	02	2.02	02	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah organisasi sosial yang dilakukan pembinaan				444,481,000	466,705,050	Bag. Kesra

KODE	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan
				Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
				Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.01.02.2.02.03	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat					Jumlah rakor UKS TK Kecamatan yang dilaksanakan 2. Jumlah Rakerda UKS TK Kota yang dilaksanakan 3. Jumlah Rakerda UKS TK Propinsi yang diikuti 4. Jumlah sekolah yang dibina untuk lomba sekolah sehat TK. Provinsi 5. Jumlah sekolah yang dibina untuk lomba sekolah sehat tk nasional 6. Jumlah sekolah yang dibina untuk lomba sekolah sehat TK Kota 7. Jumlah peserta yang difasilitasi untuk mengikuti jambore UKS tk propinsi dan nasional	1 kali 1 kali 4 sekolah 1 sekolah 16 sekolah 9 orang			300,534,250	315,560,963	Bag. Kesra
4.01.02.2.03	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah							Persentase rancangan produk hukum daerah yang diharmonisasi	100%	470,000,000	493,500,000	Bag. Hukum
								Jumlah ranperda yang diusulkan untuk dibahas pada tahun n	6 buah			
								Jumlah perda yang dibahas di DPRD	6 buah			
								Jumlah produk hukum yang ditetapkan : - Perda - Perwako - SK	6 Perda 50 Perwako 800 SK			
								Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti terkait masalah hukum	3 permasalahan			
								Jumlah bantuan hukum yang diberikan untuk masyarakat miskin	4 perkara			
								Jumlah rencana aksi penyelesaian masalah hukum yang ditindaklanjuti	2 kegiatan			
								Jumlah sosialisasi hukum dan peraturan Perundang-undangan	2 kali			

KODE	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan		
				Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)						
				Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
									Jumlah pembuatan lembaran daerah, berita daerah, panduan hukum	100 buku				
									Jumlah peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan melalui JDIH	56 peraturan				
4	01 02 2.03 01							Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan	6 Ranperda		70,000,000	73,500,000	Bag. Hukum	
								Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	2 kali					
								Jumlah peraturan perundang-undangan yang diterbitkan	3 kajian					
4	01 02 2.03 02							Jumlah perkara hukum yang ditangani	3 perkara		330,000,000	346,500,000	Bag. Hukum	
								Jumlah perkara masyarakat miskin yang mendapat Bantuan Hukum	4 perkara					
4	01 02 2.03 03							Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dipublikasikan	100 peraturan		70,000,000	73,500,000	Bag. Hukum	
								Jumlah produk hukum yang dikelola dgn baik						
4	01 02 2.04									Persentase MoU yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama	100%	22,500,000	23,625,000	
4	01 02 2.04 01							Jumlah MoU/PKS Dalam Negeri yang difasilitasi	5 MoU/PKS		15,000,000	15,750,000		
4	01 02 2.04 03							Jumlah dokumen evaluasi kerjasama yang disusun	1 dokumen		7,500,000	7,875,000		
4	01 03									Persentase pengelolaan kegiatan yang tertib administrasi sesuai aturan	100%	865,000,000	908,250,000	
										Persentase tender/seleksi yang terselesaikan melalui UKPBJ	100%			
										Persentase terlaksananya strategi pengendalian inflasi	100%			

KODE	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan		
				Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)						
				Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
									Persentase terlaksananya penyajian data/ informasi bidang ekonomi	100%				
									Persentase terlaksananya kebijakan ekonomi & SD energi dan mineral	100%				
									Persentase BUMD yang sehat dan menguntungkan	100%				
4	01	03	2.01		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				Jumlah rekomendasi strategi pengendalian inflasi (4K) yang ditindaklanjuti	80%	170,000,000	178,500,000	Bag. Perekonomian	
									Jumlah dokumen pembentukan dan pembinaan BUMD	2 dokumen				
									Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	80%				
									Persentase lembaga yang memanfaatkan data perkembangan produksi daerah	80%				
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			Jumlah pembinaan, pengawasan dan monitoring BUMD dan RI LUD	4 Kali		80,000,000	84,000,000	Bag. Perekonomian	
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi, pengendalian inflasi	12 Kali		90,000,000	94,500,000	Bag. Perekonomian	
								Jumlah Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	5 kali					
								Jumlah Buku Produksi Daerah Bidang Ekonomi Yang Disusun	4 Dokumen					
4	01	03	2.02		Administrasi Pembangunan					Persentase pencapaian realisasi fisik kegiatan pembangunan	100%	35,000,000	36,750,000	Bag. PBJ Dalbang
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang disusun	12 dokumen		35,000,000	36,750,000	Bag. PBJ Dalbang	

KODE	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan		
				Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)						
				Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
4	01	03	2.03							Persentase pengadaan barang/ jasa yang dilakukan melalui UKPBJ	100%	650,000,000	682,500,000	
										Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui elektronik	100%			
4	01	03	2.03	01						Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	420,000,000	441,000,000	Bag. PBJ Dalbang
4	01	03	2.03	02						persentase paket pengadaan barang/jasa yang metode pelaksanaannya wajib dilakukan melalui LPSE	100%	230,000,000	241,500,000	Bag. PBJ Dalbang
4	01	03	2.04							Jumlah dokumen kebijakan bidang pertambangan energi yang disusun	4 dok	10,000,000	10,500,000	
4	01	03	2.04	03						Jumlah pembinaan, pengawasan dan monitoring usaha di bidang Energi Sumber Daya Mineral	4 Kali	10,000,000	10,500,000	Bag. Perekonomian
4	01	04								Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja Oleh Kemenpan RB	12,50	3,935,437,915	4,132,209,811	
										Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100%			
										Persentase Perangkat Daerah yang memiliki IKM dengan kategori BAIK pada tahun n	93,55%			
										Persentase Unit Pelayanan Publik Dengan Kategori Pelayanan Baik	100%			
										Persentase sarana dan prasarana kantor serta rumah dinas yang terpelihara dengan baik	85%			

KODE	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan	
				Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)					
				Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
									Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang sesuai SOP	100%			
									Persentase pelayanan informasi kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang dipublikasikan	100%			
4	01	04	2.01		Pelaksanaan Administrasi Umum				Persentase kelengkapan administrasi kegiatan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah sesuai SOP	100%	1,492,179,815	1,566,788,806	
									Persentase sambutan/ pidato/ paparan Kepala Daerah yang disiapkan dengan baik	100%			
									Persentase agenda/ kegiatan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang terlaksana	100%			
									Persentase pemeliharaan gedung kantor	100%			
									Persentase pemeliharaan rumah dinas	100%			
4	01	04	2.01	01	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian			Jumlah kelengkapan administrasi kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang siap	90 kali		1,420,179,815	1,491,188,806	Bag. Protokoler
								Jumlah Non PNS yang dijamin pemeliharaan kesehatannya	4 org				Bag. Protokoler
								Jumlah staf ahli yang difasilitasi kegiatannya	3 orang				Bag. Protokoler
4	01	04	2.01	02	Pengelolaan Perlengkapan			Jumlah pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun	1 gedung		36,000,000	37,800,000	Bag. Umum
4	01	04	2.01	01	Pengelolaan Rumah Tangga			Jumlah pemeliharaan rumah dinas/jabatan	3 gedung		36,000,000	37,800,000	Bag. Umum
4	01	04	2.02		Penataan Organisasi				Persentase usulan Perwako Tusi Perangkat Daerah yang difasilitasi	100%	420,869,000	441,912,450	

KODE	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan	
				Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)					
				Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
									Persentase jabatan pada organisasi Perangkat Daerah yang telah di ANJAB dan ABK	100%			
									Persentase jabatan yang telah ditetapkan kelas jabatannya oleh Kemennan RB	100%			
									Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan dan menyusun Survey IKM sesuai pedoman	100%			
									Persentase Perangkat Daerah yang penyelenggaraan pelayanan publiknya dengan kategori BAIK	85%			
									Persentase PD yang menyusun dokumen ketatalaksanaan sesuai dengan pedoman	64,52%			
									Persentase PD yang menyampaikan dokumen LKJIP tepat waktu	100%			
									Persentase Perangkat Daerah yang nilai komponen pelaporan kinerja dalam kategori BAIK	100%			
4	01	04	2.02	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			Jumlah Ranperda/Perda/Perwako yang disusun	2 Dokumen		85,000,000	89,250,000	Bag. Organisasi
								Jumlah dokumen Anjab dan ABK Perangkat Daerah yang disusun	31 OPD				
4	01	04	2.02	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			Jumlah Laporan SKM yang disusun	1 dokumen		195,869,000	205,662,450	
								Jumlah sosialisasi pelayanan publik yang dilaksanakan	1 kali				Bag. Organisasi
								Jumlah laporan kompetisi inovasi publik (KIPP) yang disusun	3 OPD				Bag. Organisasi
4	01	04	2.02	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi (LKJIP)	2 dokumen		140,000,000	147,000,000	Bag. Organisasi

KODE	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan				
				Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)								
				Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
4	01	04	2.03		Protokol dan Komunikasi Pimpinan					Jumlah pelayanan seremonial dan keprotokolan yang dilaksanakan	160 kali	Persentase acara kedinasan (seremonial keprotokolan) yang difasilitasi dengan baik	100%	2,021,389,100	2,122,458,555	Bag. Protokoler
												Persentase Rapat Koordinasi yang difasilitasi dengan baik	100%			
												Persentase Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang didokumentasikan dengan baik	100%			
												Persentase Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dipublikasikan dengan baik	100%			
4	01	04	2.03	01	Fasilitasi Keprotokolan					Jumlah jadwal kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang disusun	24 dokumen			188,906,100	198,351,405	Bag. Protokoler
										Jumlah Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	18 Kali					
4	01	04	2.03	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					Jumlah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	90 Kali			1,382,483,000	1,451,607,150	Bag. Protokoler
4	01	04	2.03	03	Pendokumentasian tugas pimpinan					Jumlah dokumen kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang didokumentasi dan publikasikan	432 dokumen			450,000,000	472,500,000	Bag. Protokoler
4	01	04	2.04		Perencanaan dan Keuangan							Persentase perencanaan dan keuangan yang dilaporkan	100%	1,000,000	1,050,000	
4	01	04	2.04	02	Pengelolaan Keuangan					Jumlah gaji KDH/WKDH yang dibayarkan	12 bulan			1,000,000	1,050,000	Bag. PA

BAB V


PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021, sesuai dengan sifatnya adalah sebagai dokumen perencanaan taktis tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh. Isi dari Rencana Kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi *stakeholder* yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 baik dalam lingkup program maupun kegiatan.
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan bersama.
3. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya.

Peran serta maksimal dari seluruh potensi *stakeholder* dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggungjawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Harapannya rencana kerja ini dapat mendorong peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh kedepannya.

Payakumbuh, Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

Drs. H. RIDA ANANDA, M.Si
NIP. 0680607 198809 1 001

**INVENTARISASI, IDENTIFIKASI SERTA PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DOKUMEN
RENJA DENGAN PROGRAM DAM KEGIATAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

OPD : SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN : 2021

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN KE-3 (2021)				PERMENDAGRI 90/2019									
Urusan/PD	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	KODEFIKASI					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERANGAN	
				URUSAN	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
1	2	3	4	5					6	7	8	9	
Pendukung/ Otda/Adm Keuangan	3.00.01.3.00.01.01.06.07	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	4	01	01	2	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	
	3.00.01.3.00.01.01.06.01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	01	01	2	01	03	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	
	3.00.01.3.00.01.01.06.19	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh	4	01	01	2	01	04	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				4	01	01	2	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	3.00.01.3.00.01.01.01.01	Program Pelayanan Adm Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	4	01	01	2	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	3.00.01.3.00.01.01.01.02	Program Pelayanan Adm Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	4	01	01	2	03	02	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	3.00.01.3.00.01.01.01.03	Program Pelayanan Adm Perkantoran	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4	01	01	2	03	03	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				4	01	01	2	03	04	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	
	3.00.01.3.00.01.01.01.06	Program Pelayanan Adm Perkantoran	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	4	01	01	2	03	06	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	
	3.00.01.3.00.01.01.01.07	Program Pelayanan Adm Perkantoran	Penyediaan jasa administrasi keuangan	4	01	01	2	03	07	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	
	3.00.01.3.00.01.01.01.08	Program Pelayanan Adm Perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4	01	01	2	03	08	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	
	3.00.01.3.00.01.01.01.09	Program Pelayanan Adm Perkantoran	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	4	01	01	2	03	09	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	
	3.00.01.3.00.01.01.01.10	Program Pelayanan Adm Perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	4	01	01	2	03	10	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Alat Tulis Kantor	
	3.00.01.3.00.01.01.01.11	Program Pelayanan Adm Perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4	01	01	2	03	11	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN KE-3 (2021)				PERMENDAGRI 90/2019									
Urusan/PD	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	KODEFIKASI					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERANGAN	
				URUSAN	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
1	2	3	4	5					6	7	8	9	
	3.00.01.3.00.01.01.01.12	Program Pelayanan Adm Perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	4	01	01	2	03	12	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	
	3.00.01.3.00.01.01.01.13	Program Pelayanan Adm Perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4	01	01	2	03	13	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	3.00.01.3.00.01.01.01.15	Program Pelayanan Adm Perkantoran	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4	01	01	2	03	15	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
	3.00.01.3.00.01.01.01.17	Program Pelayanan Adm Perkantoran	Penyediaan Makanan dan Minuman	4	01	01	2	03	17	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Makanan dan Minuman	
	3.00.01.3.00.01.01.01.18	Program Pelayanan Adm Perkantoran	Rapat-rapat dan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	4	01	01	2	03	18	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	
	3.00.01.3.00.01.01.01.19	Program Pelayanan Adm Perkantoran	Penyediaan Tenaga Adm dan Teknis Perkantoran	4	01	01	2	03	08	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Utk THL Kebersihan
				4	01	01	2	03	05	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Utk THL Keamanan
				4	01	01	2	03	06	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Onerasional	utk THL sopir
				4	01	04	2	01	02	Program Adminstrasi Umum	Pelaksanaan Administrasi Umum	Pengelolaan Perlengkapan	Utk THL Ged. Kantor PB
				4	01	04	2	01	03	Program Adminstrasi Umum	Pelaksanaan Administrasi Umum	Pengelolaan Rumah Tangga	Uth THL Rumah Tangga PB
				4	01	04	2	01	01	Program Adminstrasi Umum	Pelaksanaan Administrasi Umum	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	utk Adc dan THL lainnya di bag protokoler & dok
	3.00.01.3.00.01.01.01.21	Program Pelayanan Adm Perkantoran	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kes. non PNS	4	01	04	2	01	01	Program Adminstrasi Umum	Pelaksanaan Administrasi Umum	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	utk GC Kepala Daerah
	3.00.01.3.00.01.01.02.03	Program Peningkatan Sappras Aparatur	Pembangunan gedung kantor										
	3.00.01.3.00.01.01.02.04		Pengadaan Kendaraan Dinas/Mobil Jabatan	4	01	01	2	03	19	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pengadaan Mobil Jabatan	
	3.00.01.3.00.01.01.02.05		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	4	01	01	2	03	20	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	
	3.00.01.3.00.01.01.02.11		Pengadaan kelengkapan sarana prasarana rumah jabatan/dinas	4	01	01	2	03	21	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	
	3.00.01.3.00.01.01.02.07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	4	01	01	2	03	22	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN KE-3 (2021)				PERMENDAGRI 90/2019									
Urusan/PD	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	KODEFIKASI					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERANGAN	
				URUSAN	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
1	2	3	4	5					6	7	8	9	
	3.00.01.3.00.01.01.02.08		Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	4	01	01	2	03	23	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	
	3.00.01.3.00.01.01.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	4	01	01	2	03	24	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	
	3.00.01.3.00.01.01.02.10		Pengadaan mobeleur	4	01	01	2	03	25	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pengadaan Mebeleur	
	3.00.01.3.00.01.01.02.20		Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	4	01	01	2	03	26	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	
	3.00.01.3.00.01.01.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4	01	01	2	03	28	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	
	3.00.01.3.00.01.01.02.23		Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	4	01	01	2	03	29	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	
	3.00.01.3.00.01.01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	4	01	01	2	03	30	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	
	3.00.01.3.00.01.01.02.25		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	4	01	01	2	03	31	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	
	3.00.01.3.00.01.01.02.26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4	01	01	2	03	32	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	
	3.00.01.3.00.01.01.02.27		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	4	01	01	2	03	33	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	
	3.00.01.3.00.01.01.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4	01	01	2	03	34	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	
				4	01	01	2	03	37	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Rehab sedang/ berat rumah dinas	
				4	01	01	2	03	38	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Rehab sedang/ berat gedung kantor	
	3.00.01.3.00.01.01.03.02	Program Peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	4	01	01	2	04	02	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	
	3.00.01.3.00.01.01.	Program Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimteks implementasi peraturan perundang-undangan	4	01	01	2	04	11	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
	3.00.01.3.00.01.01.06.23	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bimteks Implementasi AKIP	4	01	01	2	04	11	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
	3.00.01.3.00.01.01.28. 01	Program Penyelenggaraan Pemerintah Umum dan Perangkat Daerah	Penyelenggaraan lomba kompetensi lurah	4	01	02	2	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Pengelolaan Administrasi Wilayah	
	3.00.01.3.00.01.01.28. 02		Peningkatan kompetensi aparatur pemerintah kelurahan	4	01	02	2	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Pengelolaan Administrasi Wilayah	

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN KE-3 (2021)				PERMENDAGRI 90/2019									
Urusan/PD	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	KODEFIKASI					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERANGAN	
				URUSAN	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
1	2	3	4	5					6	7	8	9	
	3.00.01.3.00.01.01.28. 03		Penyelenggaraan lomba kompetensi camat	4	01	02	2	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Pengelolaan Administrasi Wilayah	
	3.00.01.3.00.01.01.28. 04		Pembinaan pelayanan administrasi terpadu	4	01	02	2	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Pengelolaan Administrasi Wilayah	
	3.00.01.3.00.01.01.28. 05		Koordinasi penyusunan laporan keuangan pertanggungjawaban (LKPI)	4	01	02	2	01	03	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
	3.00.01.3.00.01.01.28. 06		Koordinasi penyusunan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (ILPPD)	4	01	02	2	01	03	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
	3.00.01.3.00.01.01.28. 69		Koordinasi penyusunan laporan evaluasi kinerja pemerintah daerah (EKPPD) dan koordinasi	4	01	02	2	01	03	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
			Koordinasi penyusunan Evaluasi kemampuan penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD)	4	01	02	2	01	03	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
	3.00.01.3.00.01.01.28. 72		Penyelenggaraan administrasi RT/RW se kota Pavakumbuh	4	01	02	2	01	01	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	
	3.00.01.3.00.01.01.28. 73		Lomba kelurahan berprestasi	4	01	02	2	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Pengelolaan Administrasi Wilayah	
	3.00.01.3.00.01.01.28. 74		Koordinasi penyusunan profil kelurahan	4	01	02	2	01	01	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	
	3.00.01.3.00.01.01.28. 77		Fasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi daan rapat kerja Camat dan Lurah	4	01	02	2	01	01	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	
			Penyediaan buku administrasi pemerintah Kecamatan	4	01	02	2	01	01	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	
			Penyediaan buku administrasi pemerintah Kelurahan	4	01	02	2	01	01	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	
	3.00.01.3.00.01.01.28. 10		Data rupa bumi	4	01	02	2	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Pengelolaan Administrasi Wilayah	
	3.00.01.3.00.01.01.28. 68		Fasilitasi batas daerah	4	01	02	2	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Pengelolaan Administrasi Wilayah	
	3.00.01.3.00.01.01.28. 63		Koordinasi pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat	4	01	02	2	01	01	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	
	3.00.01.3.00.01.01.28. 70	Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH	Rapat koordinasi pemerintahan umum	4	01	02	2	01	01	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	
			Dialog/Audiensi dengan Tomas, Pim Orsos dan Ormas	4	01	04	2	01	01	Program Administrasi Umum	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN KE-3 (2021)				PERMENDAGRI 90/2019									
Urusan/PD	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	KODEFIKASI					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERANGAN	
				URUSAN	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
1	2	3	4	5					6	7	8	9	
	3.00.01.3.00.01.01.51.01	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	Pelayanan ibadah haji	4	01	02	2	02	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan rakyat	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	
	3.00.01.3.00.01.01.51.02		Operasional Tim Ramadhan	4	01	02	2	02	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan rakyat	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	
	3.00.01.3.00.01.01.51.03		Operasional wirid pengajian	4	01	02	2	02	01	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
	3.00.01.3.00.01.01.51.04		Peringatan hari besar islam	4	01	02	2	02	01	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
	3.00.01.3.00.01.01.51.07		Fasilitasi kegiatan kampung alquran	4	01	02	2	02	01	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
	3.00.01.3.00.01.01.51.08		Fasilitasi kegiatan subuh berjamaah dan magrib mengaji	4	01	02	2	02	03	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan rakyat	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masvarakat	
	3.00.01.3.00.01.01.51.09		Peningkatan kompetensi imam, khatib dan pengurus mesjid	4	01	02	2	02	01	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
	3.00.01.3.00.01.01.52.01	Program Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Sosial Keagamaan	Fasilitasi kegiatan didikan subuh	4	01	02	2	02	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan rakyat	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	
	3.00.01.3.00.01.01.52.02		Fasilitasi kegiatan keagamaan dan budaya	4	01	02	2	02	03	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan rakyat	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masvarakat	
	3.00.01.3.00.01.01.52.03		Koordinasi fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan bidang pendidikan keagamaan	4	01	02	2	02	01	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
	3.00.01.3.00.01.01.52.05		fasilitasi MTQ Nasional	4	01	02	2	02	01	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
	3.00.01.3.00.01.01.52.08	Program Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Sosial Keagamaan	Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang Kesra	4	01	02	2	02	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan rakyat	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	
	3.00.01.3.00.01.01.52.09		Sertifikasi guru TPQ/MDTA	4	01	02	2	02	01	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	diusulkan untuk dipindah ke diknas

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN KE-3 (2021)				PERMENDAGRI 90/2019									
Urusan/PD	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	KODEFIKASI					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERANGAN	
				URUSAN	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
1	2	3	4	5					6	7	8	9	
	3.00.01.3.00.01.01.53.01	Program Peningkatan Pendidikan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	4	01	02	2	02	03	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan rakyat	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	
	3.00.01.3.00.01.01.28.75	Program Penyelenggaraan Pemerintah Umum dan Perangkat Daerah	Pelaksanaan kegiatan BBGRM	4	01	02	2	01	01	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	
	3.00.01.3.00.01.01.25.01	Program Penataan Peraturan Per-UU	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	4	01	02	2	03	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	Fasilitasi Bantuan Hukum	
	3.00.01.3.00.01.01.25.03		Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	4	01	02	2	03	01	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
	3.00.01.3.00.01.01.25.04		Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	4	01	02	2	03	03	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
	3.00.01.3.00.01.01.25.06		Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari, keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	4	01	02	2	03	01	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
	3.00.01.3.00.01.01.25.07		Bantuan hukum untuk masyarakat miskin	4	01	02	2	03	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	Fasilitasi Bantuan Hukum	
	3.00.01.3.00.01.01.25.05		Publikasi peraturan perundang-undangan	4	01	02	2	03	03	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
				4	01	02	2	04	01	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Pindah dari Bappeda
				4	01	02	2	04	03	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Pindah dari Bappeda
	3.00.01.3.00.01.01.32.05	Program Peningkatan kapasitas kelembagaan	Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang ekonomi	4	01	03	2	01	02	Program Perekonomian dan Pembangunan	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
				4	01	03	2	01	01			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
	3.00.01.3.00.01.01.32.06		Pembinaan dan monitoring usaha pertambangan dan energi	4	01	03	2	04	03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN KE-3 (2021)				PERMENDAGRI 90/2019									
Urusan/PD	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	KODEFIKASI						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				URUSAN	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
1	2	3	4	5						6	7	8	9
	3.00.01.3.00.01.01.32.07		Koordinasi dan pengendalian inflasi daerah	4	01	03	2	01	02	Program Perekonomian dan Pembangunan	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
	3.00.01.3.00.01.01.32.08		Fasilitasi dan koordinasi forum pengembangan ekonomi daerah (FPED)	4	01	03	2	01	02	Program Perekonomian dan Pembangunan	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
	3.00.01.3.00.01.01.55.01	Program Peningkatan produksi daerah	Fasilitasi dan koordinasi pembentukan BUMD	4	01	03	2	01	01				
	3.00.01.3.00.01.01.55.03		Pengumpulan, updating dan analisis data informasi perkembangan produksi daerah bidang ekonomi	4	01	03	2	01	02	Program Perekonomian dan Pembangunan	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
	3.00.01.3.00.01.01.55.02		Fasilitasi promosi produk unggulan daerah	4	01	03	2	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	
	3.00.01.3.00.01.01.48.01	Program Peningkatan Pengendalian Administrasi Pembangunan	Monitoring, evaluasi dan pengendalian adm pembangunan (DAU dan Non DAU)	4	01	03	2	02	02	Program Perekonomian dan Pembangunan	Administrasi Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
	3.00.01.3.00.01.01.48.02		Penyusunan laporan kegiatan pembangunan	4	01	03	2	02	03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Administrasi Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
	3.00.01.3.00.01.01.49.03	Program Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	Operasional penyelenggaraan unit layanan pengadaan (ULP)	4	01	03	2	03	01	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
	3.00.01.3.00.01.01.49.02		Operasional penyelenggaraan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)	4	01	03	2	03	02	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
				4	01	03	2	03	03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
	3.00.01.3.00.01.01.16.04	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	4	01	04	2	03	02	Program Administrasi Umum	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
	3.00.01.3.00.01.01.16.05		Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	4	01	04	2	01	01	Program Administrasi Umum	Pelaksanaan Administrasi Umum	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	
	3.00.01.3.00.01.01.16.06		Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	4	01	04	2	03	02	Program Administrasi Umum	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
	3.00.01.3.00.01.01.16.07		Penyebarnya informasi kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah	4	01	04	2	03	03	Program Administrasi Umum	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN KE-3 (2021)				PERMENDAGRI 90/2019									
Urusan/PD	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	KODEFIKASI					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERANGAN	
				URUSAN	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
1	2	3	4	5					6	7	8	9	
	3.00.01.3.00.01.01.16.08		Peningkatan pelayanan keprotokolan	4	01	04	2	03	01	Program Administrasi Umum	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan	
	3.00.01.3.00.01.01.93.03	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	4	01	04	2	01	01	Program Administrasi Umum	Pelaksanaan Administrasi Umum	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	
	3.00.01.3.00.01.01.47.03	Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi Daerah	Penataan organisasi perangkat daerah, penyusunan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas OPD	4	01	04	2	02	01	Program Administrasi Umum	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
	3.00.01.3.00.01.01.47.04	Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi Daerah	Penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja	4	01	04	2	02	01	Program Administrasi Umum	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
		Program Penataan Organisasi dan Kelembagaan Daerah	Fasilitasi forum kerukunan pemberdayaan aparatur daerah							Program Administrasi Umum	Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
	3.00.01.3.00.01.01.06.08	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	4	01	02	2	01	03	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
	3.00.01.3.00.01.01.06.10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	4	01	04	2	02	02	Program Administrasi Umum	Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
	3.00.01.3.00.01.01.06.15	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik	4	01	04	2	02	02	Program Administrasi Umum	Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
	3.00.01.3.00.01.01.06.16	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Kapasitas Ketatalaksanaan	4	01	04	2	02	02	Program Administrasi Umum	Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
	3.00.01.3.00.01.01.06.17	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pendampingan pelaksanaan penilaian Unit Pelayanan Publik	4	01	04	2	02	02	Program Administrasi Umum	Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
	3.00.01.3.00.01.01.06.20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan dan Evaluasi SP	4	01	04	2	02	02	Program Administrasi Umum	Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	

